



# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024**

Oleh :  
Tim Penyusun Laporan Kinerja  
Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana  
Tahun Anggaran 2024

email : [organisasi.setdabombana@gmail.com](mailto:organisasi.setdabombana@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian PANRB mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2024. Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efesiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance, dan Clean Government.

Rumbia, Maret 2025



BUPATI BOMBANA,

Ir. H. BURHANUDDIN, M.Si



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Bombana pada tahun 2024 memiliki 5 (lima) sasaran strategis dengan total 11 (sebelas) indikator kinerja, dan 11 (sebelas) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 11 (sebelas) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 6 indikator;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 indikator; dan
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 4 indikator.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,5
	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,75
	Angka Pengangguran	Persen	2,64
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar	Poin	71,80
	Indeks Konektifitas Wilayah	Poin	71,17
Meningkatnya Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,73
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,96

Tujuan 2 :Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	89,00
	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP
	Nilai Maturitas SPIP	Poin	3,30
	Nilai SAKIP	Poin	67,50

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 1.302.603.253.425,50,- atau 89,89% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 1.449.031.636.540,00.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I     PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	3
C. Gambaran Umum .....	4
1. Kondisi Geografis .....	4
2. Kondisi Demografis .....	6
3. Perangkat Daerah .....	9
4. Sumber Daya Manusia Aparatur .....	13
5. Capaian Kinerja Tahun 2023.....	14
D. Isu-Isu Strategis .....	15
E. Sistematika Laporan .....	17
BAB II     PERENCANAAN KINERJA .....	18
A. Rencana Strategis 2023-2026 .....	18
B. Perjanjian Kinerja .....	19
C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 .....	20
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....	24
A. Pengukuran Kinerja .....	24
B. Analisis Capaian Kinerja .....	25
C. Realisasi Anggaran .....	60
D. Prestasi Tahun 2024 .....	74
BAB IV    PENUTUP .....	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani sangat dibutuhkan untuk mewujudkan program-program pembangunan yang strategis dan berdampak besar bagi masyarakat. Birokrasi juga merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sejumlah komponen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan integritas. Tata kelola pemerintahan yang baik tentunya dimulai dari aparatur pemerintah.

Dengan alasan tersebut, reformasi birokrasi harus dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi harus disertai rencana tindak (*action plan*) yang jelas serta implementasinya secara konkret dan konsekuen. Dengan demikian, upaya reformasi birokrasi dapat membawa implikasi yang nyata terhadap kinerja pelayanan publik. Dalam kaitan itu maka reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dalam seluruh aspeknya.

#### **A. Latar Belakang**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :



1. Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi Instansi Pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP meliputi:

1. Rencana strategis;
2. Perjanjian kinerja;
3. Pengukuran kinerja;
4. Pengelolaan data kinerja;
5. Pelaporan kinerja;
6. Reviu dan evaluasi kinerja.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Laporan kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan dari pelaporan kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
3. Penyusunan LKj berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. LKj Pemerintah Kabupaten Bombana;





4. menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran;
5. strategis Pemerintah Kabupaten Bombana tahun 2022 dan perkembangan dari tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
6. Kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2022. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja dengan realisasinya;
7. LKj yang telah disusun disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Dalam Negeri.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Penyusunan LKj juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Laporan Kinerja Pemerintah juga digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan penilaian terhadap kinerja pemerintah selama tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026, sebagai bahan pengambilan kebijakan, serta penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien pada tahun-tahun berikutnya.



### C. Gambaran Umum

#### 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Bombana, yang beribu kota di Kecamatan Rumbia, merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Pada awal terbentuknya, Kabupaten Bombana terdiri atas 6 wilayah kecamatan. Namun sejak tahun 2007 telah terjadi pemekaran sejumlah Kecamatan di Kabupaten Bombana seiring dengan tuntutan otonomi daerah (Undang Undang Nomor 22 tahun 1999).

Secara geografis, Kabupaten Bombana terletak di bagian Selatan Garis Khatulistiwa, memanjang dari Utara ke Selatan dengan titik koordinat  $4^{\circ} 22' 59,4''$  LS –  $5^{\circ} 28' 26,7''$  LS (sepanjang + 180 km) dan membentang dari Barat ke Timur diantara  $121^{\circ} 27' 46,7''$  BT –  $122^{\circ} 10' 9,4''$  BT (sepanjang + 154 km) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Selatan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Buton dan Kabupaten Muna.

Kabupaten Bombana memiliki luas wilayah  $\pm 15.153,47 \text{ km}^2$ , yang terdiri dari wilayah daratan seluas  $\pm 3.316,16 \text{ km}^2$  atau sekitar 21,88% dan sisanya merupakan wilayah perairan laut yang luasnya  $\pm 11.837,31 \text{ km}^2$  atau sekitar 78,12%. Wilayah administrasi Kabupaten Bombana terbagi atas 22 Kecamatan, 121 Desa dan 22 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Bombana

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)
		Desa	Kelurahan	
1	Kabaena	2	2	103,57



2	Kabaena Utara	6	-	132,97
3	Kabaena Selatan	4	-	129,2
4	Kabaena Barat	4	1	39,43
5	Kabaena Timur	5	2	121,25
6	Kabaena Tengah	7	-	275,58
7	Rumbia	1	4	58,99
8	Mataoleo	11	-	108,53
9	Kepulauan Masaloka Raya	5	-	2,66
10	Rumbia Tengah	2	3	21,11
11	Rarowatu	8	1	166,81
12	Rarowatu Utara	7	1	239,4
13	Lantari Jaya	9	-	285,01
14	Mata Usu	5	-	456,17
15	Poleang Timur	3	2	101,55
16	Poleang Utara	8	-	237,27
17	Poleang Selatan	5	-	89,88
18	Poleang Tenggara	5	-	133,51
19	Poleang	4	6	115,39
20	Poleang Barat	11	-	325,05
21	Tontonunu	5	-	131,14
22	Poleang Tengah	4	-	41,69
Jumlah		121	22	3.316,16





Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Bombana



Sumber : Perda No. 13 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Bombana

## 2. Kondisi Demografis

Jumlah Penduduk Kabupaten Bombana per 31 Desember 2022 sebesar 160.108 jiwa, yang tersebar di 22 (dua puluh dua) Kecamatan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 9.256 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Poleang sebesar 14.702 jiwa yang terbagi kedalam 4.686 Kepala Keluarga (KK), sedangkan Kecamatan yang jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Mata Usu sebanyak 2.020 jiwa yang terbagi kedalam 695 Kepala Keluarga (KK), sebagaimana tabel berikut :



Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bombana Berdasarkan Kecamatan per 31 Desember 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK
1.	Poleang	15,522	5,015
2.	Poleang Timur	11,058	3,392
3.	Rarowatu	7,124	2,317
4.	Rumbia	12,943	4,005
5.	Kabaena	3,402	1,151
6.	Kabaena Timur	8,583	2,638
7.	Poleang Barat	13,607	4,320
8.	Mata Oleo	8,264	2,496
9.	Rarowatu Utara	8,019	2,517
10.	Poleang Utara	11,980	3,771
11.	Poleang Selatan	7,853	2,480
12.	Poleang Tenggara	4,748	1,445
13.	Kabaena Selatan	3,640	1,246
14.	Kabaena Barat	8,668	2,764
15.	Kabaena Utara	4,729	1,503
16.	Kabaena Tengah	5,162	1,771
17.	Kep. Masaloka Raya	2,748	887
18.	Rumbia Tengah	8,200	2,540
19.	Poleang Tengah	4,030	1,312
20.	Tontonunu	6,036	1,930
21.	Lantari Jaya	9,692	3,009
22.	Mata Usu	2,047	689
TOTAL		168,055	53,198

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bombana



Dari segi kepadatan, Kecamatan Poleang merupakan wilayah yang paling padat penduduk, sementara Kecamatan 456 Jiwa/ Km² menjadi Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.3 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Bombana Berdasarkan Kecamatan per 31 Desember 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km²)
1.	Poleang	15,522	115	135
2.	Poleang Timur	11,058	102	108
3.	Rarowatu	7,124	167	43
4.	Rumbia	12,943	59	219
5.	Kabaena	3,402	104	33
6.	Kabaena Timur	8,583	121	71
7.	Poleang Barat	13,607	325	42
8.	Mata Oleo	8,264	109	76
9.	Rarowatu Utara	8,019	239	34
10.	Poleang Utara	11,980	237	51
11.	Poleang Selatan	7,853	90	87
12.	Poleang Tenggara	4,748	134	35
13.	Kabaena Selatan	3,640	129	28
14.	Kabaena Barat	8,668	39	222
15.	Kabaena Utara	4,729	133	36
16.	Kabaena Tengah	5,162	276	19
17.	Kep. Masaloka Raya	2,748	3	916
18.	Rumbia Tengah	8,200	21	390
19.	Poleang Tengah	4,030	42	96





20.	Tontonunu	6,036	131	46
21.	Lantari Jaya	9,692	285	34
22.	Mata Usu	2,047	456	4
TOTAL			168,055	2.725

*Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bombana  
Tahun 2024*

3. Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- 2) Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- 3) Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana merupakan Inspektorat Tipe A;
- 4) Dinas Daerah Kabupaten Bombana, terdiri dari :
  - a. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
  - b. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
  - c. Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;



- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
- f. Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan;
- g. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
- h. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- i. Dinas Sosial Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- j. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
- m. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;



- n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - o. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan ketertiban umum Perlindungan masyarakat sub urusan Ketentraman dan ketertiban Umum dan sub urusan pemadam Kebakaran;
  - p. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - q. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan bidang Tenaga kerja;
  - r. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - s. Dinas Perpustakaan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
  - t. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - u. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
- 5) Badan Daerah terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
  - b. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;





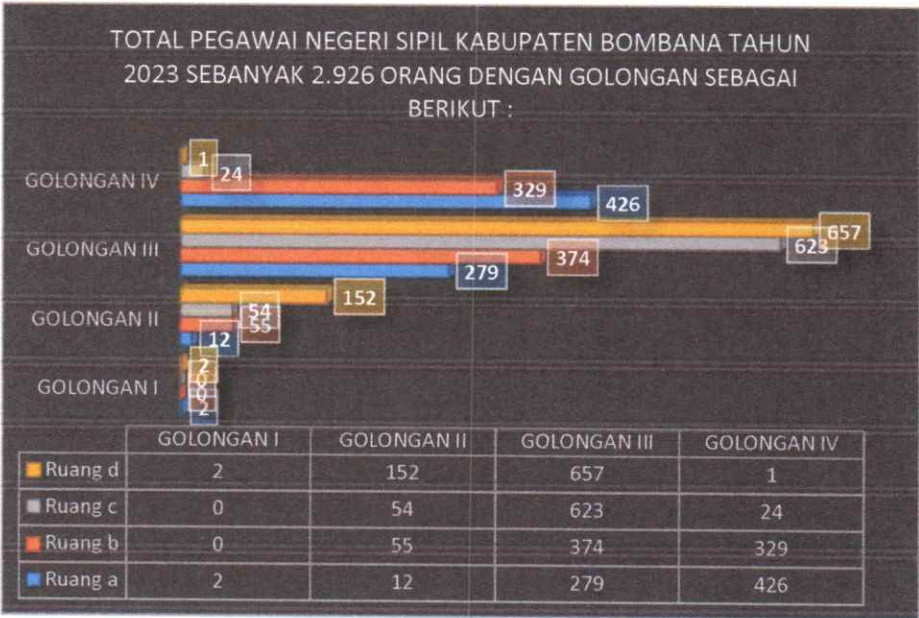
- 
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - d. Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe C melaksanakan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan.
  - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan Fungsi Penunjang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 6) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.
- 7) Kecamatan, terdiri dari :
- a. Kecamatan Kabaena Tipe B;
  - b. Kecamatan Kabaena Barat Tipe B;
  - c. Kecamatan Kabaena Selatan Tipe B;
  - d. Kecamatan Kabaena Tengah Tipe A;
  - e. Kecamatan Kabaena Timur Tipe A;
  - f. Kecamatan Kabaena Utara Tipe A'
  - g. Kecamatan Masaloka Raya Tipe B;
  - h. Kecamatan Lantari Jaya Tipe A;
  - i. Kecamatan Mata Oleo Tipe A;
  - j. Kecamatan Matausu Tipe B;
  - k. Kecamatan Poleang Tipe A;
  - l. Kecamatan Poleang Selatan Tipe B;
  - m. Kecamatan Poleang Tengah Tipe B;
  - n. Kecamatan Poleang Tenggara Tipe B;
  - o. Kecamatan Poleang Timur Tipe A;
  - p. Kecamatan Poleang Utara Tipe A;
  - q. Kecamatan Rarowatu Tipe A;
  - r. Kecamatan Rarowatu Utara Tipe A;
  - s. Kecamatan Rumbia Tipe A;
  - t. Kecamatan Rumbia Tengah Tipe B.
-



4. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Kondisi sumber daya aparatur pada Pemerintah Kabupaten Bombana disajikan dalam grafik sebagai berikut :

Chart 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bombana berdasarkan Golongan



Sumber data : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2024

Berdasarkan grafik PNS Kabupaten Bombana diatas, dapat digambarkan bahwa PNS golongan III/b merupakan kelompok Golongan PNS dengan jumlah terbanyak dengan jumlah 1839 PNS dan golongan I/b dengan jumlah paling sedikit dengan jumlah 1 PNS. Berdasarkan Database Kepegawaian Badan



Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia jumlah keseluruhan PNS di Kabupaten Bombana 10.069 orang.

5. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2023

Sebelum diuraikan perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja tahun 2024 terlebih dahulu disampaikan capaian kinerja Tahun 2023 guna memberikan gambaran terhadap capaian kinerja tahun 2024 yang merupakan tingkat keberhasilan kinerja Kabupaten Bombana Tahun 2023.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 yang telah disusun dalam Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2023 dan telah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi ESR Reviu sebagai berikut :

Tabel 1.4 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2023

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALI-SASI	CA-PAIAN (%)
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5	4,26	85,2
		2	Tingkat Kemiskinan	10,05	10,73	83,87
		3	Angka Pengangguran	2,82	1,16	158,86
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	4	Indeks Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar	70,33	77,49	110,18
		5	Indeks Konektifitas Wilayah	68,34	50,40	73,75
3	Meningkatnya Kualitas SDM	6	Indeks Pembangunan Manusia	67,76	68,02	103,38
4	Meningkatnya Kualitas	7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,64	74,28	106,66





	Lingkungan Hidup					
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	8	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,00	85,38	97,02
		9	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
		10	Nilai Maturitas SPIP	3,15	3,6	114,28
		11	Nilai SAKIP	64,80	66,49	102,60

#### D. Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bombana untuk periode 2023-2026 yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Bombana. Pembentukan isu-isu strategis di Kabupaten Bombana ini dilakukan berdasarkan komponen terhadap analisis hasil pembangunan periode sebelumnya; telaah terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Bombana 2005-2025; telaah terhadap RPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2023-2026; telaah terhadap isu nasional; telaah terhadap dokumen kualitas lingkungan hidup; analisis yang berasal dari dunia akademik, usaha/bisnis, sosial budaya, dan lain sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan Pembangunan Kabupaten Bombana, yaitu :

1. Identifikasi permasalahan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bombana berdasarkan urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:
  - a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
  - b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
  - c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
  - f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;



- 
2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bombana berdasarkan urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:
    - a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
    - b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
    - c. Urusan Pemerintahan Bidang pangan;
    - d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
    - e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
    - f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    - h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    - i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
    - j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika;
    - k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
    - l. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
    - m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
    - n. Urusan Pemerintah Bidang Statistik;
    - o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
    - p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;
    - q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan;
    - r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
  3. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bombana Berdasarkan Urusan Pemerintahan Pilihan
    - a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
    - b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata;
    - c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
    - d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
    - e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
    - f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi.
-



Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Indeks Konektifitas Wilayah	83,17 Poin
<b>Sasaran 3 :</b> Meningkatnya Kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia	71,06 Poin
<b>Sasaran 4 :</b> Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,98 Poin
<b>Tujuan 2 :</b> Meningkatkan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	57 Poin
<b>Sasaran 5 :</b> Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat	91 Poin
	Opini Laporan Keuangan	WTP
	Nilai Maturitas SPIP	3,6 Poin
	Nilai SAKIP	71 Poin

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam RPD dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Pada tahun 2024 perjanjian kinerja Bupati Bombana mengalami perubahan dengan adanya perubahan anggaran 2024 yang ditetapkan November 2024.

Tabel 2.2 Perbandingan Perjanjian Kinerja Bupati Bombana Tahun 2024

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,5
		2	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,75
		3	Angka Pengangguran	Persen	2,64
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	4	Indeks Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar	Poin	71,80
		5	Indeks Konektifitas Wilayah	Poin	71,17
3	Meningkatnya Kualitas SDM	6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,73





4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,96
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	89,00
		9	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP
		10	Nilai Maturitas SPIP	Poin	3,30
		11	Nilai SAKIP	Poin	67,50

C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah RKA tahun 2024, yang terdiri dari 125 (seratus dua puluh lima) program sebagai berikut:

Tabel 2.3 RKA Tahun 2024

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	602.381.210.634
2	Program Pengelolaan Pendidikan	79.404.991.890
3	Program Pengembangan Kurikulum	1.451.802.300
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	96.536.869.332
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.575.402.600
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	722.907.000
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	918.727.600
8	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	15.901.872.530
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.842.183.000
10	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	7.625.692.400
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4.633.288.650
13	Program Penataan Bangunan Gedung	23.396.965.900
14	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	10.053.971.450
15	Program Penyelenggaraan Jalan	110.388.537.485
16	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	270.880.800
17	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.463.665.600
18	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	-
19	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	2.570.909.000
20	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.029.063.000



21	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	4.419.789.000
22	Program Penanggulangan Bencana	1.177.359.300
23	Program Pemberdayaan Sosial	482.261.000
24	Program Rehabilitasi Sosial	397.765.800
25	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.288.903.000
26	Program Penanganan Bencana	694.609.000
27	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	301.040.800
28	Program Perencanaan Tenaga Kerja	45.440.200
29	Program Penempatan Tenaga Kerja	718.975.100
30	Program Hubungan Industrial	208.020.400
31	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	479.201.100
32	Program Perlindungan Perempuan	228.059.000
33	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	99.628.500
34	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	648.383.000
35	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	264.548.000
36	Program Perlindungan Khusus Anak	609.047.000
37	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	788.132.550
38	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.008.029.800
39	Pengawasan Keamanan Pangan	112.887.500
40	Program Penanganan Kerawanan Pangan	180.495.800
41	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	124.340.000
42	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	350.000.000
43	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	92.498.600
44	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.432.847.560
45	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	15.012.800
46	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	44.312.800
47	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	21.550.000
48	Program Pengelolaan Persampahan	4.064.756.300
49	Program Pendaftaran Penduduk	447.530.700
50	Program Pencatatan Sipil	105.213.200
51	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.039.008
52	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	33.361.300
53	Program Administrasi Pemerintahan Desa	954.125.200
54	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	2.149.238.900
55	Program Pengendalian Penduduk	646.585.000
56	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.794.542.000
57	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.832.413.000
58	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.102.184.100
59	Program Pengelolaan Pelayaran	2.444.248.200





60	Program Informasi dan Komunikasi Publik	4.262.561.000
62	Program Aplikasi Informatika	2.103.203.200
63	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	817.200.000
64	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	175.326.000
65	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	96.018.200
66	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	62.730.500
67	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	298.539.900
68	Program Pengembangan UMKM	3.389.406.200
69	Program Promosi Penanaman Modal	577.308.000
70	Program Pelayanan Penanaman Modal	817.845.100
71	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	136.184.400
72	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	50.177.200
69	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	166.385.900
70	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	5.455.376.100
71	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000
72	Program Pengembangan Kebudayaan	2.417.897.750
73	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	559.617.900
74	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	913.460.500
75	Program Pembinaan Perpustakaan	2.535.817.000
76	Program Pengelolaan Arsip	558.012.700
77	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	48.396.000
78	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	6.566.798.480
79	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	4.690.732.100
80	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.062.399.300
81	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.066.076.900
82	Program Pemasaran Pariwisata	1.577.347.400
83	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.496.687.000
84	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.492.702.000
85	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.284.092.800
86	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	20.786.708.350
87	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	7.169.327.200
88	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	70.940.000
90	Program Penyuluhan Pertanian	1.520.922.600
91	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.366.871.100
92	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.335.056.400
93	Program Pengembangan Ekspor	68.000.000
94	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	76.627.800
95	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	562.219.600
96	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	81.228.200
97	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	326.538.900





98	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	75.942.100
99	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17.969.663.400
100	Program Perekonomian dan Pembangunan	4.003.596.400
101	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	18.051.830.000
100	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.086.407.200
101	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.244.141.800
102	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	187.454.338.800
103	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.634.398.100
104	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.199.539.400
105	Program Kepegawaian Daerah	3.811.846.572
106	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.640.396.300
107	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.593.160.200
108	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.136.911.800
109	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.073.655.300
110	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.551.129.400
111	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	15.937.212.898
112	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2.823.924.600
113	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	55.435.600
114	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	31.930.700
115	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	816.921.500
116	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	58.005.651.822
117	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	110.957.400
118	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	225.737.000
119	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	327.298.400
120	Program Perencanaan Lingkungan hidup	350.000.000
121	Program Perumusan Kebijakan dan Asistensi	785.763.300
122	Program Kawasan Pemukiman	1.060.799.000
123	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera ( KS)	1.832.413.000
124	Program Pengembangan Perumahan	100.000.000
125	Program Pengaruhutamakan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	117.566.500



BAB III  
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Bombana Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Bupati Bombana merupakan kinerja tahun ke-3 pada periode Renstra Pemerintah Kabupaten Bombana 2023-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 102,25% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

Sasaran I			
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas			
Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,5 %	5,04%	91,64
2. Tingkat Kemiskinan	9,75 %	10,54%	91,90
3. Angka Pengangguran	2,64 %	1,43%	145,83

Sasaran II			
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah			
Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Indeks Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar	71,80 Poin	78,17 Poin	108,87
2. Indeks Konektifitas Wilayah	71,17 Poin	51,45 Poin	72,29

Sasaran III			
Meningkatnya Kualitas SDM			
Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Indeks Pembangunan Manusia	68,73 Poin	68,85 Poin	100,17



Sasaran IV			
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,96 Poin	76.11 Poin	108,79

Sasaran V			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel			
Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Indeks Kepuasan Masyarakat	89,00 Poin	85,33 Poin	95,88
2. Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100
3. Nilai Maturitas SPIP	3,30 Poin	3,6 Poin	109,09
4. Nilai SAKIP	67,50 Poin	67,76 Poin	100,39

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 6 indikator;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 1 indikator; dan
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 4 indikator.

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran I	
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Target Nasional	Realisasi	Capaian (%)
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,5 %	7,6%	5,04%	91,64
Tingkat Kemiskinan	9,75 %	7,2%	10,54%	91,90%





Angka Pengangguran	2,64 %	3,5%	1,43%	145,83%
--------------------	--------	------	-------	---------

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pembangunan suatu daerah. Perekonomian suatu wilayah digambarkan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu :

- a. Menurut Pendekatan Produksi;
- b. Menurut Pendekatan Pendapatan;
- c. Menurut Pendekatan Pengeluaran.

Selama lima tahun terakhir, Kabupaten Bombana menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan peningkatan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) setiap tahunnya. Meskipun mengalami variasi dalam laju pertumbuhan, secara umum perekonomian Bombana tetap menunjukkan ketahanan dan daya saing yang cukup baik.

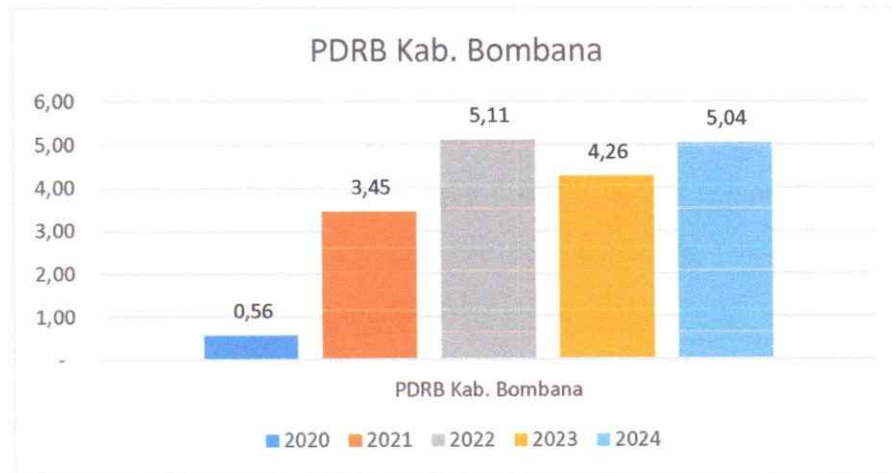
Pada tahun 2021, PDRB ADHK Kabupaten Bombana tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,49%, meningkat dari 4.708,74 miliar rupiah pada 2020 menjadi 4.873,22 miliar rupiah pada 2021. Pertumbuhan ini menandakan awal dari pemulihan ekonomi setelah dampak pandemi COVID-19 yang sempat memperlambat aktivitas ekonomi pada 2020. Sektor-sektor utama seperti pertanian, perikanan, perdagangan, serta industri pengolahan mulai mengalami perbaikan, didorong oleh meningkatnya permintaan serta kebijakan pemulihan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, sektor konstruksi dan jasa juga mulai bangkit, seiring dengan meningkatnya kembali mobilitas masyarakat dan aktivitas investasi di berbagai bidang.

Memasuki tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, dengan pertumbuhan PDRB mencapai 5,11%. Nilai PDRB ADHK naik menjadi 5.122,34 miliar rupiah, menunjukkan adanya peningkatan produktivitas di berbagai sektor utama.



Chart 3.1.

## Perkembangan PDRB Kab. Bombana Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Kab. Bombana Tahun 2024

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ini antara lain:

- Penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai sektor unggulan Bombana. Peningkatan produksi dan ekspansi pasar turut mendukung pertumbuhan ekonomi.
- Peningkatan aktivitas industri pengolahan, terutama yang berbasis hasil pertanian dan perikanan. Ini menunjukkan adanya nilai tambah yang lebih besar dari sektor primer.
- Pertumbuhan sektor perdagangan yang semakin membaik seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat dan daya beli.

Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Bombana mengalami sedikit perlambatan menjadi 4,26%, dengan PDRB ADHK mencapai 5.340,69 miliar rupiah. Meskipun masih menunjukkan pertumbuhan positif, laju pertumbuhannya lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Perlambatan ini kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:

- Ketidakpastian ekonomi global, yang berdampak pada sektor perdagangan dan investasi.

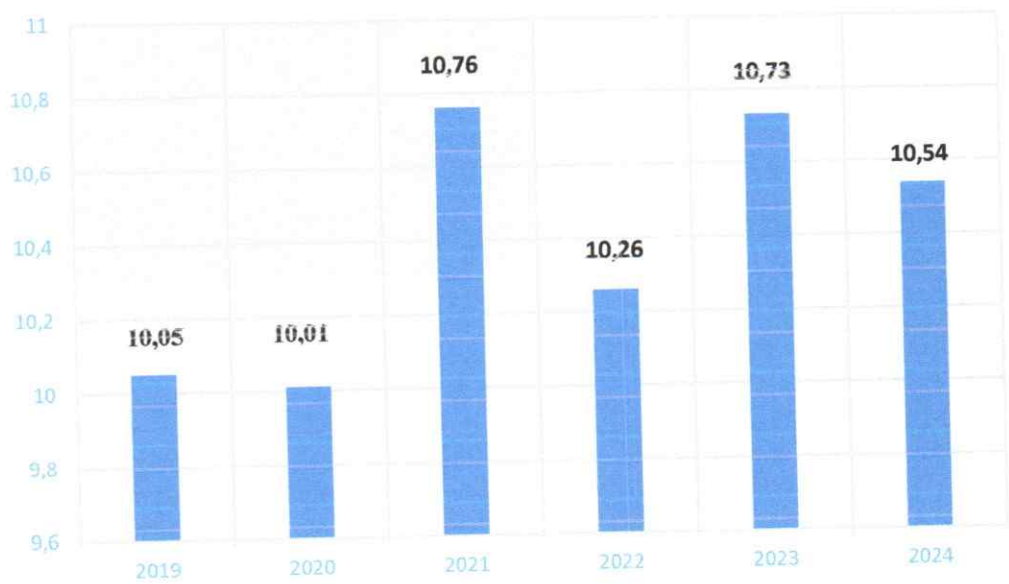


2. Tingkat Kemiskinan

Penghitungan angka kemiskinan tidak lepas dari penggunaan standar Garis Kemiskinan sebagai batas antara penduduk miskin dan tidak miskin. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non makanan. Garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp 419.429 per kapita per bulan atau sekitar Rp 13.981 per kapita per hari. Artinya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Kondisi Garis Kemiskinan di Kabupaten Bombana tahun 2019-2024 tergambar sebagai berikut :

Chart 3.2.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kab. Bombana Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Kab. Bombana Tahun 2024

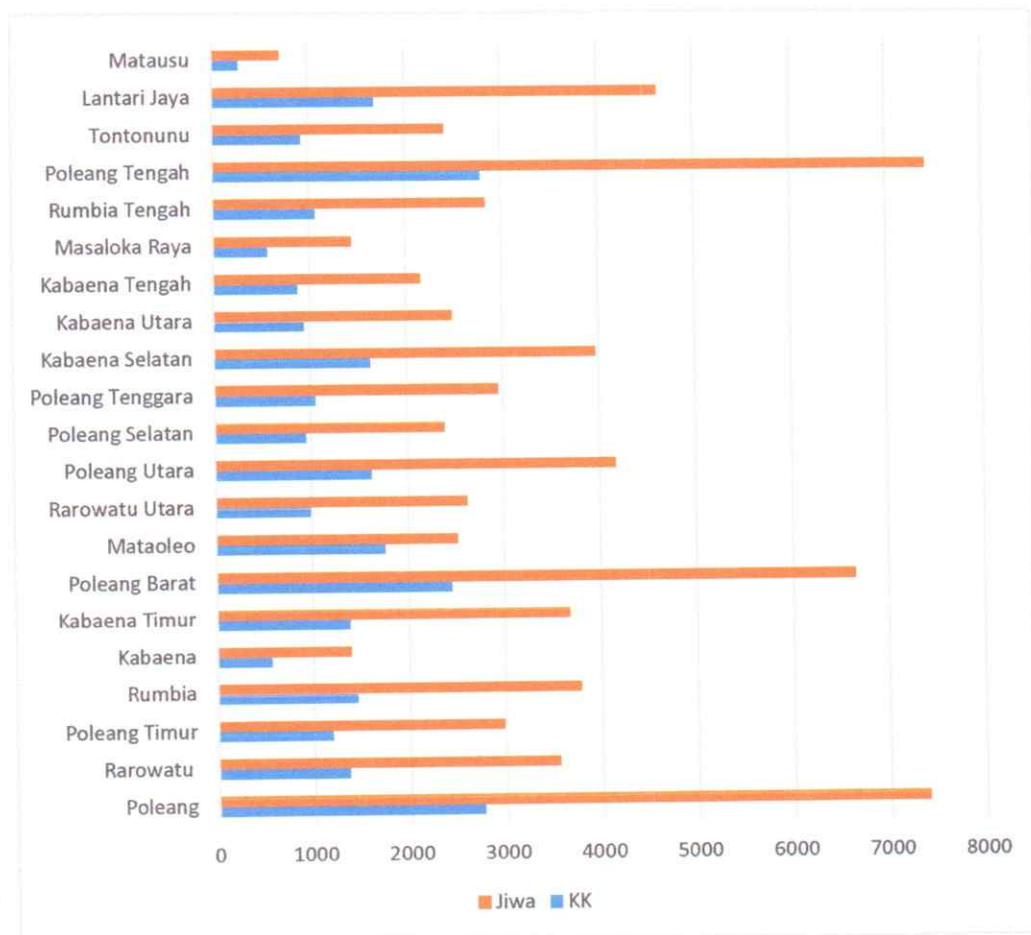




Dari chart di atas terdapat persebaran penduduk miskin sebagai berikut :

Chart 3.3

Persebaran Penduduk Miskin per Kecamatan di Kabupaten Bombana Tahun 2024



Sumber : DTKS Tahun 2024

Analisis penyebab rendahnya penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Bombana yaitu :

- Masih Terdapatnya Imbas Covid-19
- Tingkat Pengangguran terbuka
- Terjadinya Inflasi
- Masih terdapatnya Masyarakat Miskin Ekstrim.

Komitmen Bupati dalam menyalurkan berbagai bantuan sosial di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan beberapa bantuan lainnya. Dalam rangka penurunan angka kemiskinan Pemerintah Kabupaten Bombana telah melakukan langkah-langkah yaitu :

- a) Bantuan Rumah Kecamatan sebanyak 182 unit;
- b) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
- c) Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi masyarakat untuk 119 KK;
- d) Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk 159.819 Jiwa;
- e) Bantuan Sambungan Listrik untuk 160 SR;
- f) Gelar Pasar Murah sebanyak 7.000 paket;
- g) Beasiswa miskin untuk 500 orang sebanyak 2 (dua) semester;
- h) Gelar Pangan Murah sebanyak 9.020 paket;
- i) Bantuan Hukum



Gambar 3.1 Penyaluran bantuan beras bagi masyarakat miskin



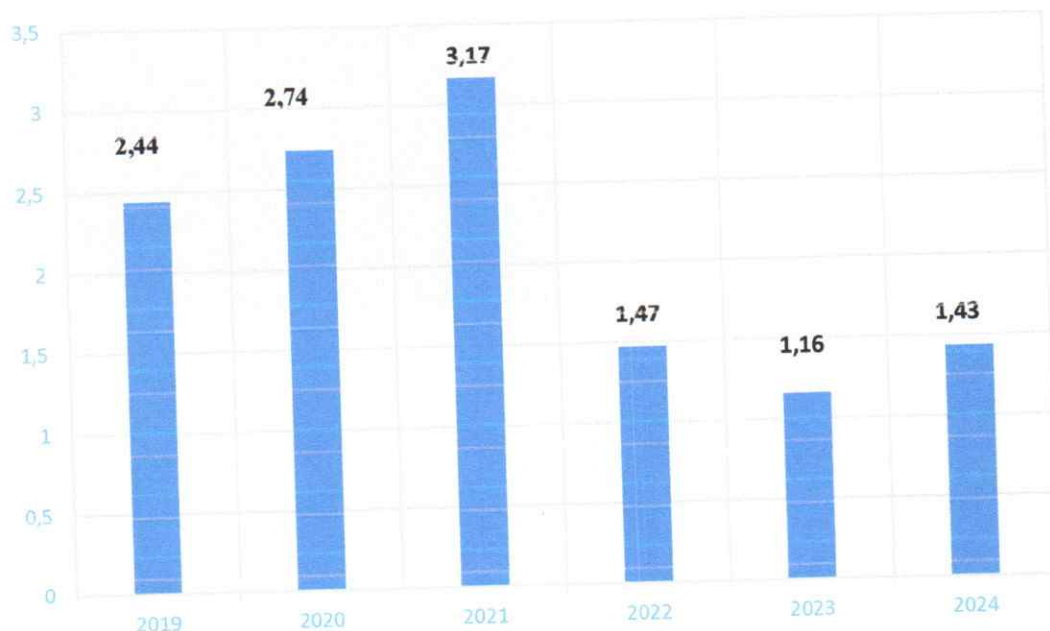
### 3. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kabupaten Bombana pada periode tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi, tahun 2024 mengalami kenaikan 0,27% persen. Dampak pasca pandemi Covid-19 mulai ada kelonggaran kegiatan masyarakat di tempat umum maupun tempat kerja sehingga aktivitas ekonomi penduduk mulai menggeliat, terlihat dari semakin ramainya UMKM yang beroperasi, proyek pembangunan juga sudah menggeliat serta konsumsi masyarakat juga semakin meningkat, sehingga berdampak pula pada penurunan tingkat pengangguran.

Kondisi Garis Kemiskinan di Kabupaten Bombana tahun 2019-2024 tergambar sebagai berikut :

Chart 3.4.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Bombana Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Kab. Bombana Tahun 2024





---

Analisis penyebab naiknya angka pengangguran di Kabupaten Bombana yaitu sebagai berikut :

- a) Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana. Seperti halnya pada ketersediaan tenaga instruktur Balai Latihan Kerja (BLK) yang mendukung pencapaian target pencari kerja yang memiliki kompetensi dalam dunia kerja melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi disadari masih minim dan akan terus membutuhkan tambahan SDM;
- b) Banyak perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bombana yang tidak menyampaikan info lowongan pekerjaan dan pencari kerja kurang mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan;
- c) Pencari kerja tidak melapor setelah diterima kerja sehingga sulit untuk didata dalam program penempatan kerja.

Pemerintah Kabupaten Bombana telah melakukan upaya menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Bombana yaitu melalui cara :

- a) Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki serta kerjasama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari yang memiliki kompetensi dan bersertifikasi untuk melatih masyarakat di Kabupaten Bombana;
- b) Menekan terjadinya perselisihan hubungan industrial dengan memberikan bimbingan dan pemahaman kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bombana terkait peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja;
- c) Dukungan Anggaran dan Sarana Prasaran yang memadai;
- d) Kebijakan pimpinan dalam mengupayakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 3.2 Pelatihan Berbasis kompetensi



Gambar 3.3 Koordinasi Dengan Perusahaan Terkait Data Ketenagakerjaan

Beberapa Langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Bombana yaitu :

- a) Mengirim Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan instruktur untuk meningkat kualitas sumber daya manusi (SDM) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;



- b) Bekerjasama dengan perusahaan yang tersebar di Kabupaten Bombana dalam hal informasi tentang lowongan kerja, sehingga para pencari kerja dipermudah dalam mencari pekerjaan;
- c) Mewajibkan semua perusahaan agar melaporkan keadaan tenaga kerjanya melalui aplikasi Wajib Lapoꝛ Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) secara online.

Sasaran II

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Target Nasional	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar	71,80 Poin	-	78,17	108,87
Indeks Konektifitas Wilayah	71,17 Poin	65 Poin	51,45 Poin	72,29

4. Indeks Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar

Kinerja infrastruktur menggambarkan tentang kondisi infrastruktur di suatu daerah dengan capaian dari masing-masing komponen. Indeks kualitas infrastruktur kabupaten Bombana dihitung dari rata-rata dari capaian kinerja bina marga, tata ruang dan keciptakaryaꝛan. Capaian kinerja bina marga dihitung dari Tingkat kemantapan jalan, capaian kinerja tata ruang dihitung dari presentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan keciptakaryaꝛan dihitung dari pemenuhan universalitas akses.

Infrastruktur untuk layanan dasar merupakan jenis infrastruktur yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan ditujukan untuk pemerataan





pembangunan di seluruh Kabupaten Bombana. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur indeks pembangunan infrastruktur layanan dasar yang termuat dalam RPD meliputi 4 (empat) komponen yaitu cakupan rumah tangga pengguna air bersih, cakupan rumah tangga yang memiliki Akses SPAL-D, cakupan sawah irigasi dan cakupan rumah layak huni.

Berdasarkan data BPS, Dinas PUPR dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2025, diperoleh data capaian dari (4) empat komponen pembentuk indikator infrastruktur dasar tahun 2024 sebagai berikut :

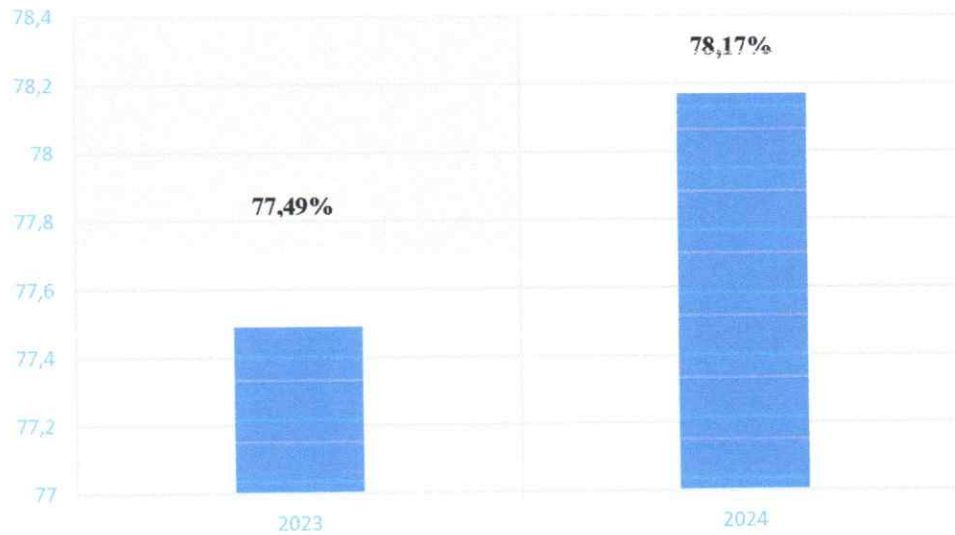
- a) Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki sumber air minum terlindungi yang mencapai 90,22 persen atau 35.348 rumah tangga dari total 39.181 rumah tangga (Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Bombana Tahun 2025);
- b) Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas air limbah domestik yang mencapai 80,62% atau 31.586 rumah. (Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS).
- c) Cakupan sawah irigasi sebesar 68,16 persen atau 901,89 Ha dari total luas sawah sebesar 13.238,20 Ha. (Sumber : Bombana Dalam Angka Tahun 2025, BPS 2025);
- d) Persentase rumah layak huni 73,66 persen (Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025).

Dari data capaian diatas, maka realisasi kinerja indeks pembangunan infrastruktur layanan dasar tahun 2024 sebesar 78,17 persen atau terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 108,87 persen dari target kinerja RPD Kabupaten Bombana tahun 2023-2026. Sementara untuk tahun sebelumnya realisasi kinerja indeks pembangunan infrastruktur layanan dasar tahun 2023 sebesar 77,49 persen. Berikut dapat dilihat perbandingannya dalam chart di bawah ini.



Chart 3.5.

## Indeks Infrastruktur Layanan Dasar Kab. Bombana Tahun 2023-2024



Sumber: Dinas Perumahan dan Dinas PUPR Kab. Bombana

Dari capaian komponen diatas, maka terlihat peningkatan terhadap Infrastruktur Layanan Dasar di Kabupaten Bombana pada tahun 2024, yang tidak luput dari hal-hal sebagai berikut :

- Dalam penyediaan air minum bagi masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak mulai PDAM Bombana yang telah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moico, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, hingga Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
- Bersinergi dengan Pemerintah Desa adalah melalui pembangunan SPAM Perdesaan di 13 desa yang wilayahnya belum dijangkau oleh pelayanan PDAM, di mana 8 desa bersumber dari DAK Bidang Air Minum, dan 5 desa bersumber dari DAU yang Ditentukan Penggunaannya;
- penanganan kawasan strategis kabupaten pada tahun 2024 mencapai 14%;
- Pembangunan Rumah layak huni di seluruh Kecamatan sebanyak 182 Unit.



*Gambar 3.4. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dan Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi kabupaten*

## 5. Indeks Konektifitas Wilayah

Indeks Konektivitas Wilayah berdasarkan RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 dihitung berdasarkan rata-rata cakupan jalan kondisi mantap dan cakupan konektivitas wilayah kecamatan dengan ibukota kabupaten. Cakupan jalan kondisi mantap dihitung berdasarkan persentase kumulatif panjang kondisi baik dan sedang terhadap panjang jalan kewenangan kabupaten sedangkan cakupan konektivitas wilayah kecamatan dengan ibukota dihitung berdasarkan pembobotan terhadap tingkat pelayanan angkutan dan trayek atau lintas yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana.

Dari data BPS Tahun 2025, cakupan panjang jalan kondisi mantap (baik dan sedang) tahun 2024 sebesar 20,29 persen atau dari total panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sepanjang 738,17 km terdapat 149,73 km jalan mantap (baik dan sedang), sedangkan untuk cakupan konektivitas wilayah kecamatan dengan ibukota kabupaten tahun 2024 yaitu sebesar 82,69 persen yang diperoleh dari perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kabupaten Bombana dengan

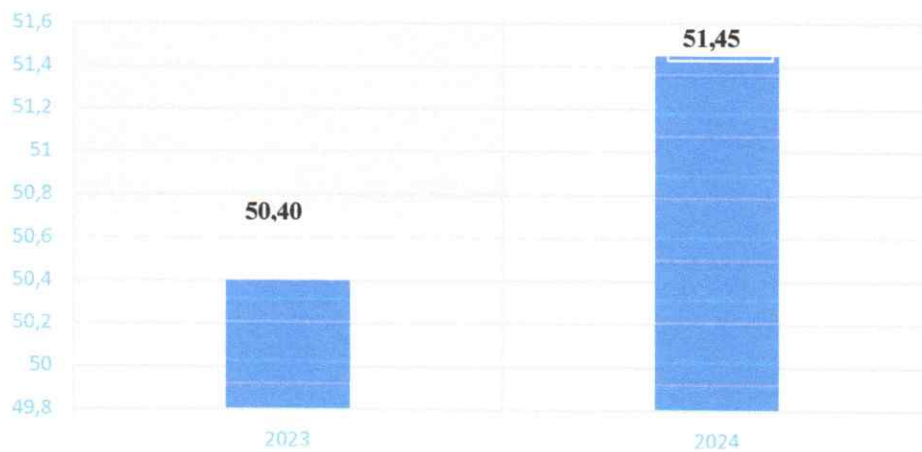




cara melakukan pembobotan terhadap tingkat pelayanan angkutan dan trayek dari ibukota ke kecamatan baik melalui angkutan darat maupun angkutan sungai dan laut.

Chart 3.6.

Indeks Konektifitas Kab. Bombana Tahun 2023-2024



Sumber: Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR Kab. Bombana Tahun 2024

Dari 2 (dua) perhitungan komponen diatas, maka diperoleh realisasi indeks konektivitas wilayah tahun 2024 sebesar 51,45 persen. Dengan target kinerja indeks konektivitas wilayah tahun 2024 sebesar 71,17 persen, maka tingkat capaian realisasi kinerja tahun 2024 hanya sebesar 71,65 persen.

Analisis penyebab tidak tercapainya target konektivitas wilayah di Kabupaten Bombana yaitu sebagai berikut :

- a) kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan; dan
- b) kurangnya sarana prasarana pendukung.

Beberapa Langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan konektivitas wilayah di Kabupaten Bombana yaitu :

- a) telah dilakukan pemenuhan trayek antar kabupaten maupun antar provinsi serta pengawasan yang maksimal;
- b) Dukungan Anggaran dan sarana prasarana yang memadai; dan



- c) kebijakan pimpinan dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan transparansi.

Sasaran III
Meningkatnya Kualitas SDM

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas SDM” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Target Nasional	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Manusia	68,73 Poin	62,7 poin	68,85 Poin	100,17

## 6. Indeks Pembangunan Manusia

Bahwa untuk mencapai tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan maka Pemerintah Kabupaten Bombana menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sesuai klasifikasi UNDP, tingkat pembangunan manusia suatu negara atau daerah dikelompokkan dalam beberapa kategori, yakni kategori rendah ( $0 \leq \text{IPM} < 60$ ), kategori sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ ), kategori tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ) dan kategori sangat tinggi ( $80 \leq \text{IPM} \leq 100$ ).

Berdasarkan rumusan UNDP komponen IPM meliputi tiga komponen yaitu komponen angka harapan hidup, komponen pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta komponen pengeluaran perkapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Adapun Komponen Indeks Pembangunan Manusia yaitu :

- a. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling/EYS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan



Komitmen Bupati dalam menyalurkan berbagai bantuan sosial di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan beberapa bantuan lainnya. Dalam rangka penurunan angka kemiskinan Pemerintah Kabupaten Bombana telah melakukan langkah-langkah yaitu :

- a) Bantuan Rumah Kecamatan sebanyak 182 unit;
- b) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
- c) Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi masyarakat untuk 119 KK;
- d) Penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat untuk 159.819 Jiwa;
- e) Bantuan Sambungan Listrik untuk 160 SR;
- f) Gelar Pasar Murah sebanyak 7.000 paket;
- g) Beasiswa miskin untuk 500 orang sebanyak 2 (dua) semester;
- h) Gelar Pangan Murah sebanyak 9.020 paket;
- i) Bantuan Hukum



Gambar 3.1 Penyaluran bantuan beras bagi masyarakat miskin





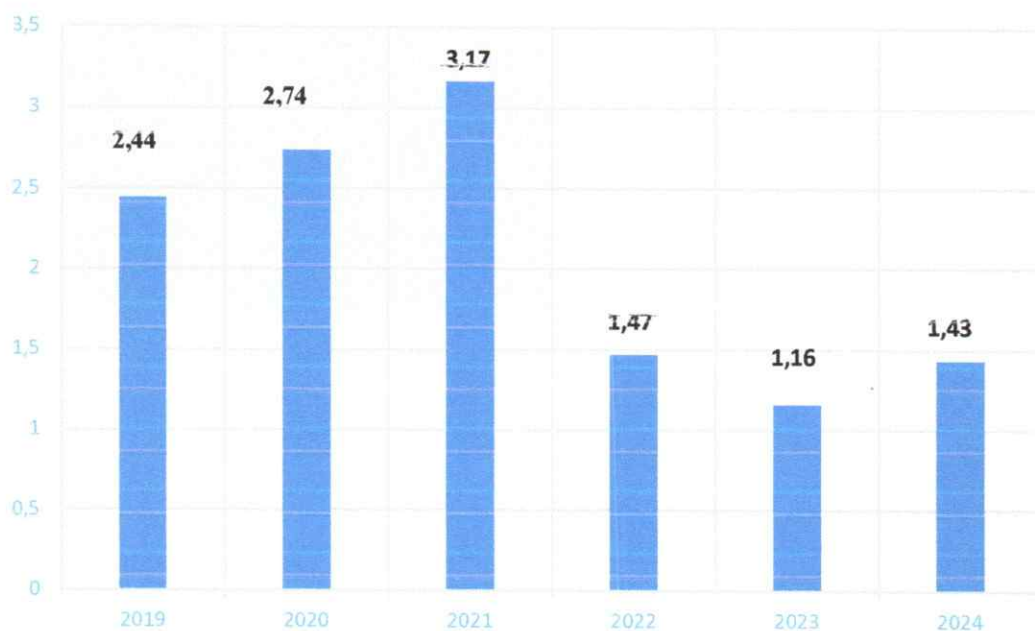
### 3. Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Kabupaten Bombana pada periode tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi, tahun 2024 mengalami kenaikan 0,27% persen. Dampak pasca pandemi Covid-19 mulai ada kelonggaran kegiatan masyarakat di tempat umum maupun tempat kerja sehingga aktivitas ekonomi penduduk mulai menggeliat, terlihat dari semakin ramainya UMKM yang beroperasi, proyek pembangunan juga sudah menggeliat serta konsumsi masyarakat juga semakin meningkat, sehingga berdampak pula pada penurunan tingkat pengangguran.

Kondisi Garis Kemiskinan di Kabupaten Bombana tahun 2019-2024 tergambar sebagai berikut :

Chart 3.4.

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Bombana Tahun 2019-2024



Sumber: BPS Kab. Bombana Tahun 2024

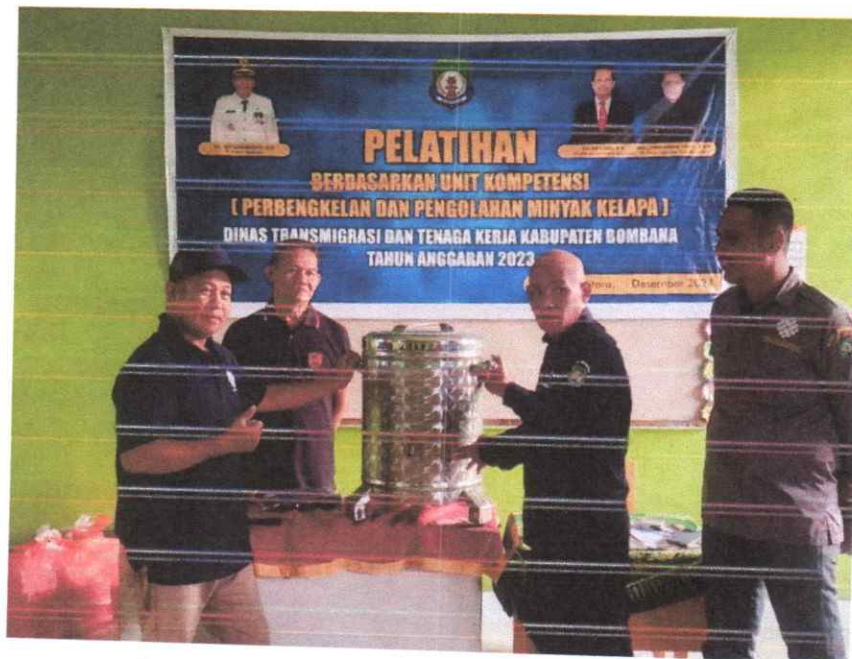


Analisis penyebab naiknya angka pengangguran di Kabupaten Bombana yaitu sebagai berikut :

- a) Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bombana. Seperti halnya pada ketersediaan tenaga instruktur Balai Latihan Kerja (BLK) yang mendukung pencapaian target pencari kerja yang memiliki kompetensi dalam dunia kerja melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi disadari masih minim dan akan terus membutuhkan tambahan SDM;
- b) Banyak perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bombana yang tidak menyampaikan info lowongan pekerjaan dan pencari kerja kurang mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan;
- c) Pencari kerja tidak melapor setelah diterima kerja sehingga sulit untuk didata dalam program penempatan kerja.

Pemerintah Kabupaten Bombana telah melakukan upaya menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Bombana yaitu melalui cara :

- a) Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki serta kerjasama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari yang memiliki kompetensi dan bersertifikasi untuk melatih masyarakat di Kabupaten Bombana;
- b) Menekan terjadinya perselisihan hubungan industrial dengan memberikan bimbingan dan pemahaman kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bombana terkait peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja;
- c) Dukungan Anggaran dan Sarana Prasarana yang memadai;
- d) Kebijakan pimpinan dalam mengupayakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.



Gambar 3.2 Pelatihan Berbasis kompetensi



Gambar 3.3 Koordinasi Dengan Perusahaan Terkait Data Ketenagakerjaan

Beberapa Langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Bombana yaitu :

- a) Mengirim Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan instruktur untuk meningkat kualitas sumber daya manusi (SDM) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;





- b) Bekerjasama dengan perusahaan yang tersebar di Kabupaten Bombana dalam hal informasi tentang lowongan kerja, sehingga para pencari kerja dipermudah dalam mencari pekerjaan;
- c) Mewajibkan semua perusahaan agar melaporkan keadaan tenaga kerjanya melalui aplikasi Wajib LapoK Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) secara online.

**Sasaran II**  
**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas**

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Target Nasional	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar	71,80 Poin	-	78,17	108,87
Indeks Konektivitas Wilayah	71,17 Poin	65 Poin	51,45 Poin	72,29

#### 4. Indeks Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar

Kinerja infrastruktur menggambarkan tentang kondisi infrastruktur di suatu daerah dengan capaian dari masing-masing komponen. Indeks kualitas infrastruktur kabupaten Bombana dihitung dari rata-rata dari capaian kinerja bina marga, tata ruang dan keciptakarya. Capaian kinerja bina marga dihitung dari Tingkat kemantapan jalan, capaian kinerja tata ruang dihitung dari presentase kesesuaian pemanfaatan ruang dan keciptakarya dihitung dari pemenuhan universalitas akses.

Infrastruktur untuk layanan dasar merupakan jenis infrastruktur yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan ditujukan untuk pemerataan



pembangunan di seluruh Kabupaten Bombana. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur indeks pembangunan infrastruktur layanan dasar yang termuat dalam RPD meliputi 4 (empat) komponen yaitu cakupan rumah tangga pengguna air bersih, cakupan rumah tangga yang memiliki Akses SPAL-D, cakupan sawah irigasi dan cakupan rumah layak huni.

Berdasarkan data BPS, Dinas PUPR dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2025, diperoleh data capaian dari (4) empat komponen pembentuk indikator infrastruktur dasar tahun 2024 sebagai berikut :

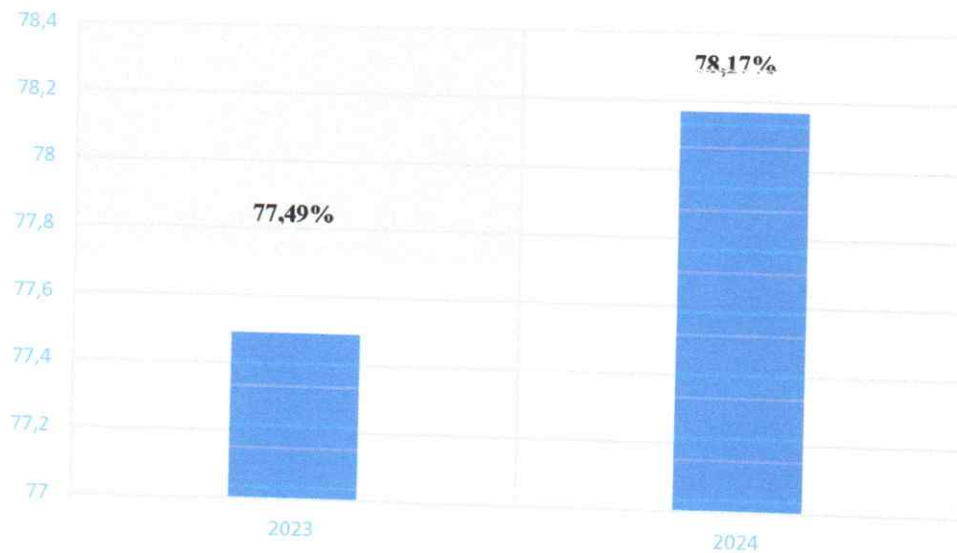
- a) Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki sumber air minum terlindungi yang mencapai 90,22 persen atau 35.348 rumah tangga dari total 39.181 rumah tangga (Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Bombana Tahun 2025);
- b) Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas air limbah domestik yang mencapai 80,62% atau 31.586 rumah. (Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS).
- c) Cakupan sawah irigasi sebesar 68,16 persen atau 901,89 Ha dari total luas sawah sebesar 13.238,20 Ha. (Sumber : Bombana Dalam Angka Tahun 2025, BPS 2025);
- d) Persentase rumah layak huni 73,66 persen (Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025).

Dari data capaian diatas, maka realisasi kinerja indeks pembangunan infrastruktur layanan dasar tahun 2024 sebesar 78,17 persen atau terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 108,87 persen dari target kinerja RPD Kabupaten Bombana tahun 2023-2026. Sementara untuk tahun sebelumnya realisasi kinerja indeks pembangunan infrastruktur layanan dasar tahun 2023 sebesar 77,49 persen. Berikut dapat dilihat perbandingannya dalam chart di bawah ini.



Chart 3.5.

## Indeks Infrastruktur Layanan Dasar Kab. Bombana Tahun 2023-2024



Sumber: Dinas Perumahan dan Dinas PUPR Kab. Bombana

Dari capaian komponen diatas, maka terlihat peningkatan terhadap Infrastruktur Layanan Dasar di Kabupaten Bombana pada tahun 2024, yang tidak luput dari hal-hal sebagai berikut :

- Dalam penyediaan air minum bagi masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana senantiasa bersinergi dengan berbagai pihak mulai PDAM Bombana yang telah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moico, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, hingga Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
- Bersinergi dengan Pemerintah Desa adalah melalui pembangunan SPAM Perdesaan di 13 desa yang wilayahnya belum dijangkau oleh pelayanan PDAM, di mana 8 desa bersumber dari DAK Bidang Air Minum, dan 5 desa bersumber dari DAU yang Ditentukan Penggunaannya;
- penanganan kawasan strategis kabupaten pada tahun 2024 mencapai 14%;
- Pembangunan Rumah layak huni di seluruh Kecamatan sebanyak 182 Unit.





Gambar 3.4. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dan Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi kabupaten

## 5. Indeks Konektifitas Wilayah

Indeks Konektivitas Wilayah berdasarkan RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 dihitung berdasarkan rata-rata cakupan jalan kondisi mantap dan cakupan konektivitas wilayah kecamatan dengan ibukota kabupaten. Cakupan jalan kondisi mantap dihitung berdasarkan persentase kumulatif panjang kondisi baik dan sedang terhadap panjang jalan kewenangan kabupaten sedangkan cakupan konektivitas wilayah kecamatan dengan ibukota dihitung berdasarkan pembobotan terhadap tingkat pelayanan angkutan dan trayek atau lintas yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana.

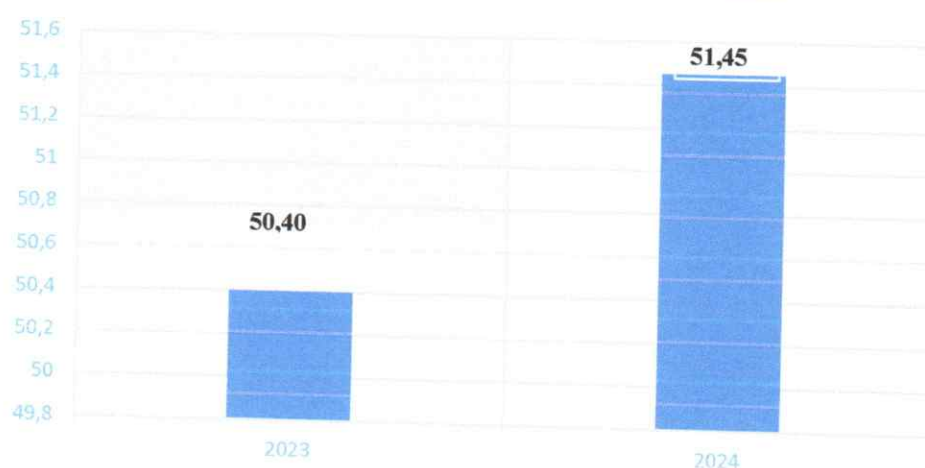
Dari data BPS Tahun 2025, cakupan panjang jalan kondisi mantap (baik dan sedang) tahun 2024 sebesar 20,29 persen atau dari total panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sepanjang 738,17 km terdapat 149,73 km jalan mantap (baik dan sedang), sedangkan untuk cakupan konektivitas wilayah kecamatan dengan ibukota kabupaten tahun 2024 yaitu sebesar 82,69 persen yang diperoleh dari perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan kabupaten Bombana dengan



cara melakukan pembobotan terhadap tingkat pelayanan angkutan dan trayek dari ibukota ke kecamatan baik melalui angkutan darat maupun angkutan sungai dan laut.

Chart 3.6.

Indeks Konektivitas Kab. Bombana Tahun 2023-2024



Sumber: Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR Kab. Bombana Tahun 2024

Dari 2 (dua) perhitungan komponen diatas, maka diperoleh realisasi indeks konektivitas wilayah tahun 2024 sebesar 51,45 persen. Dengan target kinerja indeks konektivitas wilayah tahun 2024 sebesar 71,17 persen, maka tingkat capaian realisasi kinerja tahun 2024 hanya sebesar 71,65 persen.

Analisis penyebab tidak tercapainya target konektivitas wilayah di Kabupaten Bombana yaitu sebagai berikut :

- a) kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan pengawasan; dan
- b) kurangnya sarana prasarana pendukung.

Beberapa Langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bombana dalam meningkatkan konektivitas wilayah di Kabupaten Bombana yaitu :

- a) telah dilakukan pemenuhan trayek antar kabupaten maupun antar provinsi serta pengawasan yang maksimal;
- b) Dukungan Anggaran dan sarana prasarana yang memadai, dan



- c) kebijakan pimpinan dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tranparansi.

<p style="text-align: center;"><b>Sasaran III</b> <b>Meningkatnya Kualitas SDM</b></p>
--

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas SDM” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Target Nasional	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Pembangunan Manusia	68,73 Poin	62,7 poin	68,85 Poin	100,17

## 6. Indeks Pembangunan Manusia

Bahwa untuk mencapai tujuan Meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan maka Pemerintah Kabupaten Bombana menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sesuai klasifikasi UNDP, tingkat pembangunan manusia suatu negara atau daerah dikelompokkan dalam beberapa kategori, yakni kategori rendah ( $0 \leq \text{IPM} < 60$ ), kategori sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ ), kategori tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ ) dan kategori sangat tinggi ( $80 \leq \text{IPM} \leq 100$ ).

Berdasarkan rumusan UNDP komponen IPM meliputi tiga komponen yaitu komponen angka harapan hidup, komponen pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta komponen pengeluaran perkapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Adapun Komponen Indeks Pembangunan Manusia yaitu :

a. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling/EYS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan





oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya Pendidikan (dalam tahun) yang dicapai oleh setiap anak.

b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Selain Angka Harapan Lama Sekolah, indikator pendidikan yang digunakan untuk penghitungan IPM adalah rata-rata lama sekolah (Mean Years of Schooling/MYS). Indikator ini memberikan gambaran tentang rata-rata waktu yang ditempuh penduduk dalam kegiatan pembelajaran secara formal. Populasi yang digunakan UNDP dalam menghitung MYS dibatasi pada penduduk berusia 25 tahun ke atas. Batasan itu dimaksudkan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 25 tahun masih dalam proses sekolah sehingga kurang tepat apabila dihitung MYS-nya.

peningkatan Kinerja belum terlalu memuaskan di tingkat keberhasilan masih berjalan ditempat di karenakan oleh beberapa faktor yang sering menghambat, seperti kurangnya koordinasi dan komunikasi yang menghambat aliran informasi, keterbatasan sumber daya yang mengurangi efisiensi operasional, serta strategi yang tidak efektif karena kurangnya pemahaman terhadap kondisi dan kebutuhan organisasi. Selain itu, resistensi terhadap perubahan sering kali mempertambat inovasi, sementara lemahnya monitoring dan evaluasi menyebabkan sulitnya mengidentifikasi serta mengatasi masalah secara tepat waktu. namun semua itu telah kami upayakan untuk meningkatkan kinerja telah di dicapai melalui beberapa faktor utama, seperti kepemimpinan yang efektif yang mampu memberikan arahan jelas dan inspiratif, serta ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung operasional secara optimal. Selain itu, penerapan strategi yang tepat berbasis data dan kebutuhan



organisasi, budaya kerja yang positif yang mendorong kolaborasi serta inovasi, serta pengelolaan anggaran yang efisien memastikan setiap keputusan yang diambil memberikan dampak maksimal terhadap pencapaian tujuan.

untuk mengatasi permasalahan yang menyebabkan kinerja kurang berkembang, beberapa langkah telah diambil secara sistematis. Pertama, dilakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian tujuan, termasuk kurangnya koordinasi, strategi yang kurang efektif, serta keterbatasan sumber daya. Setelah itu, komunikasi dan koordinasi antar unit kerja diperkuat dengan menerapkan sistem komunikasi yang lebih terbuka serta peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Selanjutnya, optimalisasi sumber daya dilakukan dengan menyesuaikan alokasi anggaran dan tenaga kerja berdasarkan kebutuhan prioritas. Penerapan teknologi juga dimaksimalkan guna meningkatkan efisiensi kerja. Selain itu, strategi yang lebih relevan diterapkan dengan mempertimbangkan data dan tren yang berkembang agar lebih sesuai dengan kondisi organisasi. Untuk meningkatkan motivasi dan budaya kerja yang positif, berbagai inisiatif telah dijalankan, seperti penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi dan pengembangan lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi serta inovasi. Selain itu, pengembangan kapasitas SDM menjadi fokus utama dengan menyelenggarakan pelatihan, workshop, serta program sertifikasi guna meningkatkan kompetensi Pegawai.

Sebagai langkah akhir, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dengan menetapkan indikator kinerja utama (KPI) yang jelas dan terukur. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan, sehingga kinerja organisasi dapat terus meningkat secara efektif dan efisien.



c. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup pada waktu lahir (Expectation of Life/Eo) merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka ini biasanya dihitung dengan bantuan tabel kematian (life table). Namun demikian penerapan indikator tersebut di negara berkembang dihadapkan pada masalah kelangkaan data untuk penghitungan secara langsung (direct estimate), sehingga kedua angka tersebut di Indonesia diperkirakan secara tidak langsung (indirect estimate) melalui data hasil sensus atau survei penduduk.

Umur Harapan Hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Perkembangan UHH Kabupaten Bombana periode tahun 2022-2024 mengalami trend peningkatan tetapi capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata capaian UHH Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional. capaian UHH Kabupaten Bombana Tahun 2023 adalah 70,88 Tahun dan untuk tahun 2024 adalah 71,03 Tahun. Beberapa hal yang mempengaruhi capaian UHH diantaranya status kesehatan masyarakat yang masih rendah yang ditandai dengan masih tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), status gizi balita dan prevalensi stunting, angka kesakitan akibat infeksi penyakit menular masih tinggi dan penyakit degenerative (hipertensi, jantung, DM, dll) terjadi peningkatan.

Berbagai Upaya Kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks kesehatan masyarakat antara lain dengan peningkatan cakupan imunisasi dasar, pelayanan ANC dan PNC, pelaksanaan program jaminan persalinan dengan penyediaan rumah tunggu kelahiran, peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui penyediaan jaminan kesehatan masyarakat, peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan.

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja, Dinas Kesehatan memfokuskan diri pada pengelolaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui kegiatan





Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP serta kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

d. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Indikator ini memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Semakin meningkat pendapatan seseorang diharapkan pengeluaran per kapita yang disesuaikan makin meningkat pula. Tetapi hubungan ini tidak selalu benar, terutama bila tingkat kenaikan pendapatan masih lebih rendah dari tingkat kenaikan harga secara umum.

Adapun capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bombana Tahun 2022 - 2024 adalah sebagai berikut :

Komponen IPM	TAHUN		
	2022	2023	2024
Harapan Lama Sekolah	11,89	11,90	11,91
Rata-rata Lama Sekolah	8,05	8,07	8,10
Usia harapan hidup	70,73	70,88	71,03
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	8.680	9.132	9.692
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,49	68,12	68,85

Sumber Data : BPS Tahun 2024



Gambar 3.5 Pelaksanaan Imunisasi

Sasaran IV  
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian indikator-indikator sasaran “Meningkatnya Kualitas SDM” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Target Nasional	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,96 Poin	66,5 Poin	76.11 Poin	108,79

7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

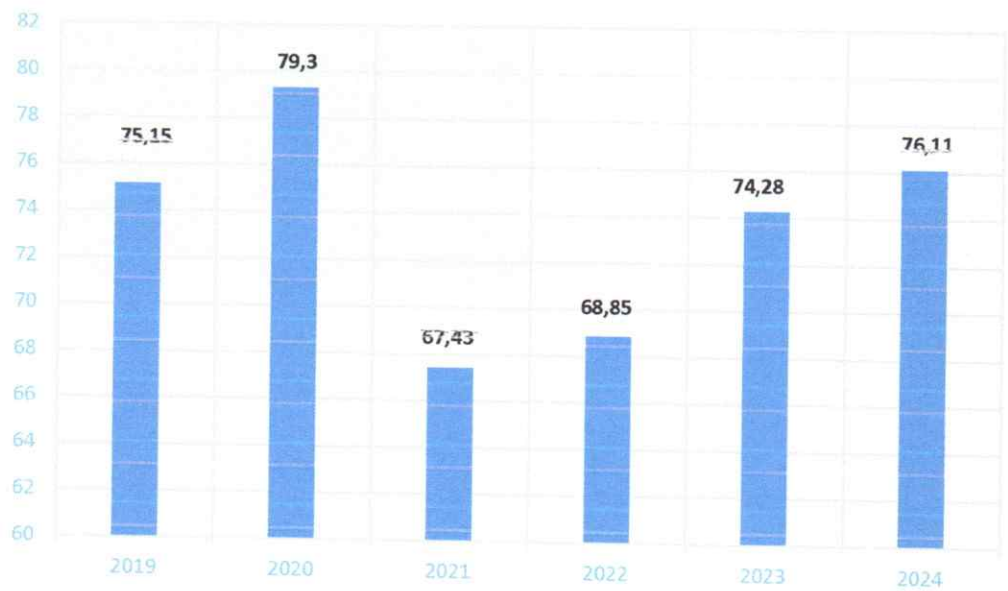
Berdasarkan RPD Kabupaten Bombana 2023-2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana mengampu Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bombana berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Tahun 2024 menunjukkan capaian indeks sebesar 76.11. Berdasarkan status kualitas lingkungan hidup, nilai IKLH tersebut masuk kategori “SEDANG”.



Capaian tersebut telah memenuhi target perencanaan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 sebesar 69,96. Perbandingan capaian IKLH dengan tahun 2023 terlihat adanya peningkatan capaian sebesar 1,83 poin. Pencapaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tersebut merupakan komposit perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Chart 3.7.

Perkembangan IKLH Kab. Bombana Tahun 2019-2024



Sumber: Kementerian LHK Tahun 2024

Beberapa faktor penyebab kurang signifikannya kenaikan IKLH dibanding tahun lalu, sebagai berikut :

- 1) Kabupaten Bombana hanya melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan dan tidak ditindaklanjuti dengan sub kegiatan pengendalian pencemaran lainnya yang dapat menunjang pencapaian target IKLH;





- 2) Tidak ada Indeks Respon Pemerintah Daerah terkait pengendalian pencemaran udara sehingga mempengaruhi Indeks Kualitas Udara yang merupakan Indeks penunjang IKLH.

Sebagai langkah peningkatan capaian kinerja dan strategi perbaikan kualitas lingkungan hidup pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Bombana melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) Pemantauan, pembinaan dan penyusunan kebijakan terhadap sumber pencemaran institusi dan non institusi;
- 3) Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan profil emisi gas rumah kaca;
- 4) Penyediaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan dan laboratorium lingkungan;
- 5) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Perihal program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja DLH Kab. Bombana (pencapaian IKLH) dapat diklasifikasi dalam empat (4) kategori program dan/atau kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Program penunjang IKLH yang dilakukan oleh DLH Kab. Bombana:  
Program pencegahan pencemaran melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut;
- 2) Program dari tugas pokok dan fungsi organisasi Perangkat Daerah yang dapat berkontribusi terhadap nilai IKLH:

Terdapat beberapa tugas pokok dan fungsi dalam penataan kinerja organisasi DLH Kabupaten Bombana yang secara tidak langsung memberi kontribusi dalam menunjang pencapaian kinerja IKLH yaitu sebagai berikut:



Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	100
Nilai Maturitas SPIP	3,30 Poin	-	3,6 Poin	109,09
Nilai SAKIP	67,50 Poin	70,01 Poin	67,76 Poin	100,39

8. Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat selain merupakan metode yang dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan, juga memungkinkan perbaikan pelayanan selain itu menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Melalui analisis kinerja dapat disusun prioritas perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan di wilayah Pemerintah Kabupaten Bombana. Pengukuran yang berkesinambungan akan memungkinkan untuk mengetahui kinerja pelayanan di 31 (tiga puluh satu) perangkat daerah dan 22 (dua puluh dua) kecamatan serta untuk memperoleh hasil evaluasi terhadap jenis pelayanan publik yang ada untuk diperbaiki kualitasnya serta adanya Indeks Kepuasan Masyarakat di tingkat perangkat daerah Kabupaten Bombana.

Berdasarkan kebijakan tersebut, hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bombana 3 tahun terakhir dapat dikategorikan sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bombana tahun 2022 s.d 2024

Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Kepuasan Masyarakat	88,54 Poin {B}	85,38 Poin {B}	85,33 Poin {B}

Menurunnya indeks kepuasan masyarakat 2 (dua) tahun terakhir, disebabkan karena partisipasi unit penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan survei kepuasan masyarakat bertambah dari 31 UPP tahun 2022, 49 UPP tahun 2023 menjadi 53 UPP ditahun 2024 sehingga rata-rata UPP menjadi pembagi bertambah banyak, namun demikian indeks kepuasan masyarakat masih berpredikat B (Baik). Upaya yang



harus dilakukan demi meningkatkan indeks kepuasan masyarakat kedepan adalah sebagai berikut :

- a. melakukan pengukuran tingkat pelayanan publik melalui survey kepuasan masyarakat secara berkala, sehingga Bagian Organisasi dapat menyusun laporan SKM tepat waktu;
- b. rutin melakukan forum komunikasi publik (FKP) dengan melibatkan stackholder dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan terkait pelayanan publik;
- c. memperbaiki kualitas layanan pada unsur layanan yang memperoleh penilaian rendah;
- d. menindaklanjuti hasil SKM dan FKP setiap periode pelaksanaan.

Pemerintah Kabupaten Bombana telah berupaya melakukan langkah-langkah peningkatan kualitas pelayanan publik dengan dengan cara :

- a. mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- c. mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- d. mendorong penyelenggara pelayanan meminimalisasi penjelasan verbal kepada penggunaanya sehingga pengguna layanan memperoleh kejelasan;
- e. mendorong Penyelenggaraan Pelayanan Publik meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
- f. mengukur ketaatan Penyelenggara Pelayanan Publik dalam memenuhi Standar Pelayanan Publik yang efektif dan efisien;
- g. mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan Kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai upaya mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; dan





- h. mendorong penyelenggara pelayanan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik dalam rangka mencegah mal administrasi.



*Gambar 3.6 Kesepakatan Ombudsman dengan Pemda Bombana tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pencegahan Mal Administrasi*



*Gambar 3.7 Pendampingan Penyusunan SKM dan FKP*



9. Opini Laporan Keuangan

Opini BPK adalah pernyataan profesional dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan. Opini BPK ini didasarkan pada beberapa kriteria, seperti kesesuaian dengan standar akuntansi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pencapaian tahun 2022 sama dengan pencapaian tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 dan tahun 2024. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan penilaian tertinggi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022, sedangkan tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bombana tetap meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menjadi pencapaian ke-11 (sebelas) kali berturut-turut Pemerintah Kabupaten Bombana meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2014 sampai dengan 2024.

Adapun Opini Laporan Keuangan Kabupaten Bombana Tahun 2018 - 2024 adalah sebagai berikut :

Indikator Sasaran	TAHUN						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Pemerintah Kabupaten Bombana telah berupaya keras untuk tetap mempertahankan peroleh opini WTP tersebut, dengan melaksanakan sebagian besar rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK, sebagai berikut :

- a. melakukan pengelolaan dan pengamanan Barang Milik Daerah serta mencatat informasi BMD pada KIB sesuai kondisi yang sesungguhnya;



- b. memproses pemulihan kelebihan pembayaran atas ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan kekurangan volume 11 pekerjaan jalan, irigasi dan jaringan dan menyetor ke kas daerah.

Disamping itu Pemerintah Kabupaten Bombana telah melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya bagi Bendahara untuk mengikuti :

- a. Kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pengelola Keuangan pada BDKN Gowa;
- b. Kegiatan Bimtek Penatausahaan SIPD-RI.



*Gambar 3.8 Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Kapasitas*



*Gambar 3.9 Pelaksanaan Bimtek SIPD RI*





## 10. Nilai Maturitas SPIP

Nilai untuk maturitas SPIP adalah 3,6 (terdefinisi) atau telah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik strategi pencapaian kinerja telah relevan dan terintegrasi, dan pelaksanaan pengendalian telah terlaksana dengan baik namun belum efektif. Permasalahan yang masih terjadi berdasarkan sudut pandang evaluator SPIP yaitu BPKP, sebagai berikut :

- a. Proses Penilaian Mandiri belum sepenuhnya melibatkan seluruh unsur dan komponen pada unit organisasi;
- b. Komponen Pencapaian Tujuan masih memerlukan perbaikan kualitas yaitu:
- c. Indikator kinerja sub kegiatan dengan tidak tepat, masih berorientasi dokumen yang seharusnya berorientasi output riil;
- d. Masih terdapat kelemahan pada Struktur dan Proses pengendalian
- e. Peningkatan Kompetensi SDM penyelenggara SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko, dan Fraud Control Plan belum merata pada seluruh pegawai;
- f. Nilai Manajemen Risiko Indeks Register Risiko belum dikelompokkan secara jelas antara Risiko Strategis OPD dan Risiko Operasional dan Peta Risiko belum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan;
- g. Nilai IEPK
  - IEPK belum menjadi indikator Kinerja Utama dalam dokumen perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memitigasi risiko korupsi;
  - Belum memadainya pembuktian pencapaian level yang membentuk nilai IEPK yang dilakukan oleh Asesor Pemda dan Asesor OPD disebabkan belum adanya saluran pelaporan internal yang efektif dan kredibel yakni hanya sebatas Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
  - Belum tercatat dan termonitoringnya kasus tindak pidana korupsi yang ditangani APH;



- h. Implementasi Fraud Control Plan (FCP) pada masing-masing OPD belum optimal.

Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bombana agar:

- a. Menginstruksikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana untuk:
- 1) Mengintegrasikan proses Manajemen Kinerja dengan proses Manajemen Risiko;
  - 2) Mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Kinerja untuk proses reviu kinerja tingkat pemerintah daerah, OPD, dan aktivitas operasional.
- b. Menginstruksikan Inspektur Daerah Kabupaten Bombana untuk:
- 1) Meningkatkan fungsi *early warning system* untuk mengantisipasi terjadinya kelemahan aktivitas pengendalian atas permasalahan yang berulang pada pengelolaan sumber daya keuangan dan non keuangan;
  - 2) Menyusun Rencana Aksi Perbaikan atas Area of Improvement serta memantau tindak lanjut perbaikan hasil Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2023.
- c. Menginstruksikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana untuk mengarahkan OPD Pengelola Aset Daerah agar meningkatkan efektivitas pengamanan Aset Daerah secara fisik, hukum, dan administrasi;
- d. Menginstruksikan seluruh Pimpinan OPD agar:
- 1) Mengoptimalkan pendokumentasian arsip penting dengan sarana penyimpanan dokumen pendukung SPIP yang memadai, aman, dan terstruktur, serta dalam bentuk digital;



Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bombana secara intensif melakukan sosialisasi dan pendampingan atas penerapan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah terhadap perangkat daerah.



Gambar 3.9 Pendampingan Penjenjangan Kinerja AKIP 2024

Rekomendasi AKIP yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana kedepan dalam peningkatan pelaksanaan AKIP sebagai berikut :





- 
- a. memperhatikan catatan implementasi akuntabilitas kinerja pada seluruh komponen penilaian baik pada tahun berjalan maupun melanjutkan perbaikan dari catatan tahun sebelumnya untuk meningkatkan perbaikan manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
  - b. melakukan identifikasi *crosscutting* kinerja sebagai bentuk *sharing outcome* Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mempercepat tercapainya indikator kinerja utama PD;
  - c. menyempurnakan penjenjangan kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya penyempurnaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam mengungkit kinerja;
  - d. melakukan perbaikan kualitas dokumen perencanaan dengan memastikan bahwa dokumen perencanaan level PD seluruhnya telah berorientasi hasil atau dampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*), menjawab isu strategis dan mandat PD dan terjaga ketepatan level pengampu kinerjanya. Selain itu agar memastikan indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART-C;
  - e. memastikan penetapan target kinerja telah memperhatikan capaian kinerja pada periode sebelumnya, target level Provinsi maupun Nasional (jika ada), dan memperhatikan kondisi sumber daya yang dimiliki;
  - f. melanjutkan proses peningkatan pemanfaatan tools pemantauan kinerja [sidasi.bombanakab.go.id](http://sidasi.bombanakab.go.id) milik Pemkab Bombana baik untuk pengukuran kinerja Level Pemda maupun PD secara berkala;
  - g. memastikan bahwa dokumen IKU Pemda dan PD pengawal kinerja utama, serta telah menyajikan rumus perhitungan, sumber data dan penanggungjawab data. Selanjutnya memastikan bahwa rumus perhitungan yang tercantum didokumen IKU sesuai dengan substansi indikatornya, sehingga data kinerja yang dihasilkan andal dan benar-benar dapat menggambarkan ketercapaian sasaran/kinerja;
  - h. menyempurnakan kualitas pelaporan kinerja baik level Pemda maupun PD dengan kedalaman informasi yang merata dan memadai. Selain itu memastikan
-



kinerja yang disampaikan pada laporan kinerja adalah selaras dengan PK mengacu tata cara penyampaian kinerja pada Peraturan Menteri No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- i. mendorong PD untuk memberikan tindak lanjut hasil evaluasi internal;
- j. mendorong tim evaluator internal untuk melakukan fungsi asistensi dan evaluasi bagi PD serta memperbaiki informasi yang disampaikan pada LHE AKIP internal spesifik dan relevan dengan kondisi masing-masing PD;
- k. mendorong inspektorat Kabupaten Bombana untuk segera mengesahkan kebijakan terkait pelaksanaan evaluasi AKIP Internal dengan butir-butir pertanyaan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan Pemda serta mendorong ada umpan balik PD.

#### C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 48 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024 dan Perubahan Peraturan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, maka pagu dan realisasi pelaksanaan anggaran Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Penerimaan yang sah, yang ditargetkan sebesar Rp 85.086.780.609,00 dengan realisasi sebesar Rp. 75.958.582.794,00 atau 89,27%.



Gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8  
Komposisi Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Tahun 2024

No	URAIAN	ANGGARAN		
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	85.086.780.609,00	75.958.582.794,00	89,27
2	Pendapatan Transfer	1.329.508.325.516,00	1.213.079.652.467,00	91,24
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	25.059.212.083,00	9.903.158.503,00	39,52
Jumlah		1.439.654.318.208,00	1.298.941.393.764,00	90,23

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD belum mencapai target yang diharapkan. Realisasi PAD Tahun 2024 realisasi sebesar Rp 75.958.582.794 atau mencapai 89,27% dari target yang diharapkan dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 1.036.363.103.925 maka terjadi penurunan penerimaan sebesar Rp 960.404.521.131. Untuk Pendapatan Transfer tahun anggaran 2024 realisasinya sebesar Rp 1.213.079.652.467 atau 91,24% dari target yang direncanakan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 944.206.652.424 maka terjadi peningkatan sebesar Rp 268.873.000.043. Sedangkan untuk realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2023 realisasinya sebesar Rp 9.903.158.503,00 atau 39,52% dan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp 15.000.000.000 maka terjadi penurunan sebesar Rp 5.096.841.497.

Jika dilihat dari komposisi anggarannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 5,84% dari total realisasi pendapatan Kabupaten Bombana di tahun 2024, sedangkan Pendapatan





Transfer memberikan kontribusi terbesar yaitu 93,38% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,76%.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 85.086.780.609 dan dapat direalisasikan lebih kecil dibandingkan target semula, yaitu sebesar Rp 75.958.582.794 atau mencapai 89,27%. Sumbangan terbesar dari PAD Kabupaten Bombana berasal dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, yaitu mencapai 99,91% dari target. Adapun perincian PAD Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9  
Perincian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	ANGGARAN		
		Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Hasil Pajak Daerah	22.865.000.000,00	16.789.407.383,00	73,43
2	Hasil Retribusi Daerah	6.835.000.000,00	7.911.817.599,00	116,21
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.241.480.609,00	16.241.480.609,00	100
4	Lain Lain Pendapatan yang Sah	39.145.300.000,00	34.982.847.203,00	89,37
Jumlah		85.086.780.609,00	75.958.582.794,00	89,27



Terlihat dalam tabel tersebut di atas bahwa komponen hasil pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melampaui target, relative lebih besar dari yang direncanakan semula. Tingginya realisasi pajak daerah tahun Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2024 ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Bombana terus mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, yang diiringi dengan usaha dalam menggali sumber-sumber potensial penerimaan pajak daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:

- a. Pendapatan transfer terdiri atas:
  - 1) Transfer Pemerintah Pusat
  - 2) Transfer antar-daerah
- b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD.

Penerimaan dari Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 1.168.672.437.516,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.064.243.884.909,00 atau mencapai target 91,06%. Adapun perincian penerimaan dari Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10  
Perincian Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	ANGGARAN		
		Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	1.168.672.437.516,00	1.064.243.884.909,00	91,06



2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	114.135.888.000,00	113.646.638.000,00	99,57
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	46.700.000.000,00	35.189.129.558,00	75,35
Jumlah		1.168.672.437.516,00	1.064.243.884.909,00	91,06

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Bombana yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri atas: (1) Pendapatan Hibah; (2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; (3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan (4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 25.059.212.083,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 9.903.158.503,00 atau mencapai 39,52%. Adapun perincian Lain-Lain Pendapatan yang sah pada Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 11  
Perincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	ANGGARAN		
		Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	%
1	Pendapatan Lain lain	25.059.212.083,00	9.903.158.503,00	39,52
Jumlah		25.059.212.083,00	9.903.158.503,00	39,52

4. Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam





hal pelayanan publik yang disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Kemampuan anggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Membiayai urusan yang bersifat mandatory dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membiayai urusan wajib dan pilihan dengan mengutamakan bidang pendidikan dan kesehatan;
- c. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung perekonomian, pariwisata dan lingkungan hidup dengan mengutamakan jalan dan jembatan serta sarana perhubungan lainnya;
- d. Stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil terutama pada sektor andalan pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, perdagangan dan pariwisata;
- e. Memenuhi komitmen kerjasama/kemitraan pembangunan dan pembiayaan;
- f. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Perangkat Daerah.

Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Bombana. Maka anggaran daerah pada dasarnya merupakan salah satu instrumen utama kebijakan publik dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maka setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan kebijakan pemerintahan, diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan sesuai potensi daerah. Berikut adalah hasil analisis realisasi, plafon dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Bombana:



Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 1.449.031.636.540,00 dan dapat direalisasikan Rp 1.302.603.253.425,50 atau mencapai 89,89%, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12  
Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	ANGGARAN		
		Target Belanja	Realisasi Belanja	%
1	Belanja Operasi	989.624.184.307,00	924.710.789.949,50	93,44
2	Belanja Modal	279.409.337.574,00	204.757.078.160,00	73,28
3	Belanja Tidak Terduga	4.534.687.659,00	1.066.690.000,00	23,52
4	Belanja Transfer	175.463.427.000,00	172.068.695.316,00	98,07
Jumlah		1.449.031.636.540,00	1.302.603.253.425,50	89,89

Jika dilihat dari komposisinya, belanja modal memberikan kontribusi sebesar 15,71% dari realisasi belanja Kabupaten Bombana di tahun 2024 sedangkan belanja operasi sebesar 70,98%, belanja tidak terduga sebesar 0,08% dan belanja transfer sebesar 13,2%. Adapun anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk Tahun Anggaran 2024, dapat diuraikan sebagai berikut:

▪ **Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Dianggarkan sebesar Rp 989.624.184.307,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 924.710.789.949,50 atau 93,44% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.13  
Perincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	ANGGARAN		
		Target Belanja	Realisasi Belanja	%
1	Belanja Pegawai	438.806.935.686,00	415.196.960.926,50	94,62
2	Belanja Barang dan Jasa	481.516.537.399,00	441.347.857.407,00	91,66



3	Belanja Subsidi	200.000.000,00	176.701.394,00	88,35
4	Belanja Hibah	69.079.711.222,00	67.968.970.222,00	98,39
5	Belanja Bantuan Sosial	21.000.000,00	20.300.000,00	96,67
Jumlah		989.624.184.307,00	924.710.789.949,50	93,44

▪ **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi dianggarkan sebesar Rp. 279.409.337.574,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 204.757.078.160,00 atau 73,28% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.14  
Perincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	ANGGARAN		
		Target Belanja	Realisasi Belanja	%
1	Belanja Modal Tanah	1.742.580.000,00	1.623.988.996,00	93,19
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	555.265.750.297,00	46.274.628.770,00	83,73
3	Belanja Gedung dan Bangunan	73.668.465.212,00	52.190.485.037,00	70,85
4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	144.054.363.065,00	102.117.940.857,00	70,89
5	Belanja Aset Tetap lainnya	2.084.089.000,00	1.087.528.800,00	52,18
6	Belanja Aset lainnya	2.594.090.000,00	1.462.505.700,00	56,38
Jumlah		279.409.337.574,00	204.757.078.160,00	73,28





#### ▪ Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. dianggarkan sebesar Rp 4.534.687.659,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.066.690.000,00 atau 23,52% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.15

Perincian Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	ANGGARAN		
		Target Belanja	Realisasi Belanja	%
1	Belanja Tidak Terduga	4.534.687.659,00	1.066.690.000,00	23,52
	Jumlah	4.534.687.659,00	1.066.690.000,00	23,52

#### ▪ Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. dianggarkan sebesar Rp 175.463.427.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 172.068.695.316,00 atau 98,07% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.16

Perincian Belanja Transfer Tahun Anggaran 2023

No	URAIAN	ANGGARAN		
		Target Belanja	Realisasi Belanja	%
1	Belanja Bantuan Keuangan	175.463.427.000,00	172.068.695.316,00	98,07
	Jumlah	175.463.427.000,00	172.068.695.316,00	98,07



Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Berikut ini alokasi anggaran yang dipergunakan demi menunjang kinerja daerah disetiap sasaran pemerintah daerah

Tabel 3.5  
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		ANGGARAN (Rp.)	% ANGGARAN
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	61.398060.550	6,18%
		2	Tingkat Kemiskinan	1.954.406.100	0,19%
		3	Angka Pengangguran	946.369.900	0,1%
2	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	4	Indeks Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar	83.618.485.751	8,47%
		5	Indeks Konektifitas Wilayah	109.965.008.400	11,15%
3	Meningkatnya Kualitas SDM	6	Indeks Pembangunan Manusia	126.057.078.105	12,77%
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	4.262.358.700	0,42%



5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	8	Indeks Kepuasan Masyarakat	26.741.733.200	2,7%
		9	Opini Laporan Keuangan	180.871.657.500	18,33%
		10	Nilai Maturitas SPIP	2.820.022.900	0,28%
		11	Nilai SAKIP	387.579.446.897	39,3%





Tabel 3.6

Pertandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		CAPAIAN (%)	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI				
1 Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,5	5,04	91,64	71.541.770.030	58.754.200.364	82,13
	2 Tingkat Kemiskinan	9,75	10,54	91,90	2.158.929.800	2.023.073.731	93,23
	3 Angka Penjangkuran	2,64	1,43	145,83	1.675.957.500	1.363.904.100	81,33
2 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	4 Infrastruktur Layanan Dasar	71,80	78,17	108,87	82.580.902.730	65.884.338.313	79,73
	5 Indeks Korektivitas Wilayah	71,17	51,45	72,29	116.934.969.783	81.786.563.854	69,94
	6 Indeks Pembangunan Manusia	68,73	68,85	100,17	193.002.986.322	103.897.439.649	56,94
3 Meningkatnya Kualitas SDM	Meningkatnya						
4 Kualitas Lingkungan Hidup	7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,96	76,11	108,79	7.834.643.660	6.540.763.832	83,43
5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan	8 Indeks Kepuasan Masyarakat	89,00	85,33	95,88	32.322.946.698	27.117.344.321	83,89



Publik yang Bersih dan Akuntabel	9	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00	191.288.276.300	183.924.236.701	96,15
	10	Nilai Mutuas \$iPI	3,30	3,6	109,09	4.922.575.100	4.727.780.849	96,04
	11	Nilai SAKIP	67,50	67,76	100,39	728.872.598.628	697.859.980.910	95,74

secara berkelanjutan, terutama terkait dengan profil Pelajar Pancasila. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek ini memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, berkeadilan, dan aman dari kekerasan, serta berupaya untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila. Penghargaan ini juga diberikan kepada pemangku kepentingan di ekosistem pendidikan yang telah mengambil langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan penguatan karakter di sekolah.

### 3. PPID

Kabupaten Bombana berhasil meraih penghargaan bergengsi sebagai badan publik terbaik pertama dalam kategori PPID Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara (Sultra) pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sultra di Hotel Ciaro Kendari, Kamis(19/12/2024).



Gambar 3.12

*Pemberian Penghargaan Penghargaan badan publik terbaik pertama dalam kategori PPIDPemda Bombana oleh Komisi Informasi Provinsi Sultra*



Penghargaan ini merupakan apresiasi atas upaya Kabupaten Bombana dalam meningkatkan pelayanan publik melalui keterbukaan informasi yang lebih baik, serta komitmennya dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam kompetisi yang diikuti oleh seluruh kabupaten dan kota se-Sultra, Kabupaten Bombana berhasil mengalahkan Kabupaten Kolaka yang meraih posisi kedua, serta Kabupaten Konawe Selatan yang berada di posisi ketiga. Prestasi ini menandakan bahwa Bombana telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan informasi publik.

#### 4. KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK

Pemerintah Kabupaten Bombana kembali meraih prestasi gemilang dalam hal tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pada tahun 2024, Pemkab Bombana berhasil memperoleh penghargaan "Predikat Penilaian Kepatuhan" dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



Gambar 3.13

*Pemberian Penghargaan Kepatuhan Pelayanan publik  
oleh Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara*

Penghargaan tersebut diberikan oleh Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tenggara dalam sebuah acara yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Kendari, Selasa (10/12/2024). Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana, Ir.

Rusdamin, menerima penghargaan tersebut mewakili Pj. Bupati Bombana. Penganugerahan ini merupakan apresiasi terhadap upaya Pemkab Bombana dalam memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini tercermin dari peningkatan signifikan dalam nilai penilaian kepatuhan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Bombana akan mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publiknya, dengan menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus berinovasi. "Momentum kegiatan ini dapat menjadi spirit bagi kami untuk tetap konsisten di tahun-tahun mendatang. Penilaian kepatuhan ini bukan hanya sebagai pengakuan, tetapi juga sebagai dorongan untuk terus memperbaiki mutu pelayanan publik,".

Penganugerahan ini diberikan berdasarkan evaluasi terhadap pemenuhan standar pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Dengan pencapaian ini, Pemkab Bombana semakin memperkuat reputasinya sebagai daerah yang peduli terhadap prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

#### 5. KESUKSESAN PENYALURAN DAK

Pemerintah Kabupaten Bombana berhasil meraih penghargaan prestisius dalam pengelolaan keuangan, yaitu Peringkat 1 sebagai Pemda Terbaik dalam kategori Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik .



Gambar 3.14

*Pemberian Penghargaan pengelolaan dan penyaluran dana DAK Fisik kepada Pemda Bombana oleh KPPN*



Penghargaan ini diserahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari, Agung Mulyono, dan diterima langsung oleh Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., di Kantor KPPN Kendari pada Selasa (6/8/2024). Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen dan kinerja Kabupaten Bombana dalam pengelolaan dan penyaluran dana DAK Fisik serta Dana Desa. Pemerintah Kabupaten Bombana dinilai berhasil dalam memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran, sehingga mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan desa. Setelah menerima penghargaan, Pj. Bupati Edy Suharmanto menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPPN Kendari yang telah mendorong percepatan pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di Kabupaten Bombana.

#### 6. KESUKSESAN PENYALURAN DANA DESA

Pemerintah Kabupaten Bombana juga meraih penghargaan prestisius dalam pengelolaan keuangan, yaitu Peringkat 3 dalam penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2024.



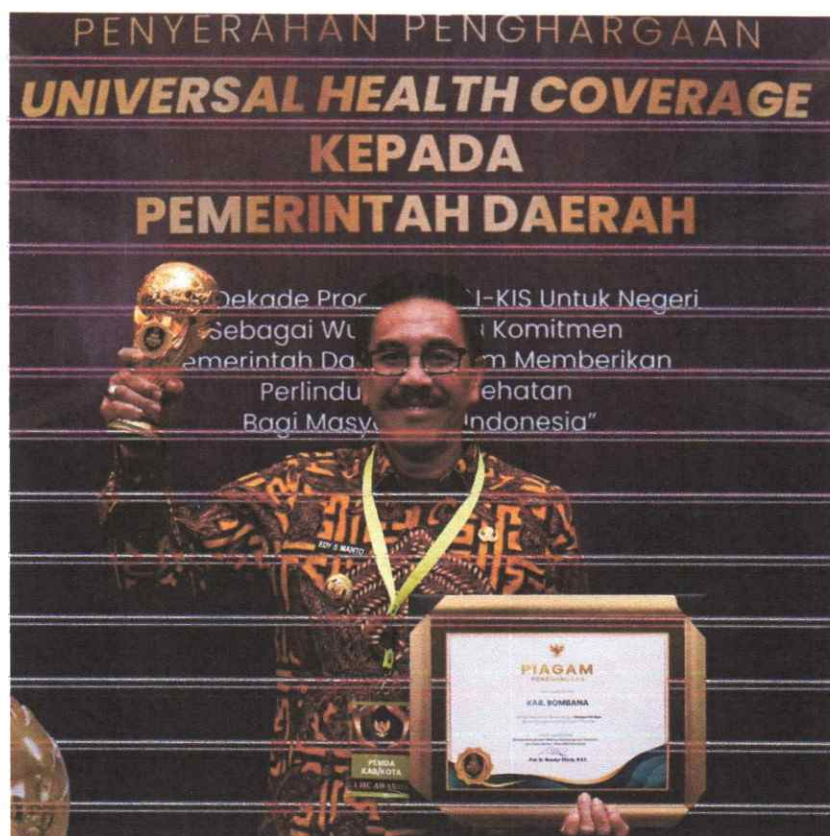
*Gambar 3.15  
Pemberian Penghargaan pengelolaan dan penyaluran Dana Desa  
kepada Pemda Bombana oleh KPPN*



Penghargaan ini juga diserahkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari, Agung Mulyono, dan diterima langsung oleh Pj. Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., di Kantor KPPN Kendari pada Selasa (6/8/2024).

#### 7. PENCAPAIAN CAKUPAN KESEHATAN UNIVERSAL

Kabupaten Bombana kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional, Kabupaten yang berada di wilayah Sulawesi Tenggara ini berhasil menerima penghargaan bergengsi dari Pemerintah Pusat sebagai Pemerintah Daerah dengan kategori Madya dalam pencapaian Cakupan Kesehatan Universal (UHC). Penghargaan tersebut diselenggarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia dan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr (HC). KH Ma'ruf Amin, di Karakatau Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, pada Kamis (8/8/2024).



*Gambar 3.16  
Pemberian Penghargaan atas pencapaian Cakupan Kesehatan Universal (UHC)  
Pemda Bombana oleh Menko PKM*

Penghargaan ini mengusung tema “Program Satu Dekade JKN-KIS Untuk Negeri Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Kesehatan Bagi Masyarakat Indonesia.” Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah menunjukkan komitmen dalam mendaftarkan seluruh penduduknya pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia, tercatat 96 kota dan 364 kabupaten yang telah berhasil mewujudkan UHC, dengan cakupan kepesertaan JKN lebih dari 95 persen dari total penduduk.

#### 8. BEST KOREOGRAFER

Kabupaten Bombana meraih penghargaan kategori Best Karoegrafer pada ajang Sultra Tenun Karnaval 2024 pada tanggal 7 Desember 2024 melalui penampilan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kabupaten Bombana dalam ajang bergengsi Sultra Tenun Karnaval 2024. Para peserta parade mengenakan pakaian dengan dekorasi motif tenun tradisional yang sarat akan makna dan filosofi, rombongan dari Bombana menampilkan karya tenun berwarna-warni yang dihias dengan ornamet lokal khas suku moronene.



*Gambar 3.17  
Keikutsertaan Bombana pada Sultra Tenun Karnaval*

Partisipasi Kabupaten Bombana mengusung tema KAMPIRI yang terdiri dari Tanduk Rumah berupa ornamet pahatan yang berbentuk tanduk kerbau, ukiran ganggang parang yang melambangkan kerja keras, ukiran tombak melambangkan



kepatriota, ukiran mata keris yang melambangkan keberanian, ukiran burung melambangkan penjaga kesulawesi, dan ukiran ragam melambangkan motif daun dan tumbuhan melambangkan keramah-tamaan dan tolong-menolong.

Dengan prestasi tersebut Bombana menunjukkan bahwa Bombana memiliki warisan budaya yang kaya melalui seni tenun dan memberikan peluang bagi pengrajin lokal agar lebih dikenal hingga tingkat nasional.

#### 9. PARIWARA KAMPANYE ANTI KORUPSI

Kabupaten Bombana masuk dalam 10 besar daerah terbaik kampanye anti korupsi. Ia berada di urutan ke enam. Wilayah yang dipimpin Edy Suharmanto itu kemudian diganjar penghargaan dalam program pariwisata kampanye anti korupsi dari lembaga rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.



Gambar 3.18

*Pemberian Penghargaan atas pariwisata kampanye anti korupsi  
Pemda Bombana oleh KPK*

Penyerahan penghargaan dilakukan di kota Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis 11 Juli 2024. Sungguh prestasi mentereng itu membanggakan warga Bombana. Demikian, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri itu sukses menambah koleksi penghargaan Pemda Bombana.



#### 10. KABUPATEN PEDULI HAM

Pemerintah Kabupaten Bombana yang diwakili oleh Penjabat (Pj.) Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si, menghadiri kegiatan penyampaian Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia mengenai penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM.



*Gambar 3.19*  
*Pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM*  
*Pemda Bombana oleh KPK*

Kegiatan tersebut berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, yang dihadiri oleh berbagai pejabat dan perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia Selasa, 10 Desember 2024. Ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bombana dalam upaya terus meningkatkan komitmen dan implementasi hak asasi manusia (HAM) di daerah.

Penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM merupakan penghargaan yang diberikan kepada daerah yang telah berhasil menunjukkan komitmen dan keberhasilan dalam pelaksanaan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Penerimaan penghargaan ini menunjukkan bahwa Bombana telah memperlihatkan upaya yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mematuhi prinsip-prinsip HAM dalam berbagai kebijakan dan pelayanan publik.

## 11. TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pemerintah Kabupaten Bombana menerima penghargaan dalam pembinaan pengembangan teknologi tepat guna yang diserahkan langsung oleh Mendes PDDT melalui Ajang Gelar Tekhologi Tepat Guna Nusantara (GTTGN) ke XXV di Kota Mataram Kegiatan tersebut berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Senin, 15 Juli 2024.



Gambar 3.20

*Pemberian Penghargaan GTTGN Pemda Bombana oleh Mendes-PDDT*

## 12. SULTRA AWARD

Sultra Awards merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Harian Kendari Pos untuk menghargai individu dan kelompok yang telah menunjukkan kontribusi positif bagi pembangunan Sulawesi Tenggara. Terdapat 24 kategori penghargaan yang diberikan, dengan harapan dapat menjadi inspirasi bagi pemimpin dan masyarakat lainnya untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerahnya.

Penghargaan ini tidak hanya mengakui capaian Pj. Bupati dan Sekda Bombana, tetapi juga menyoroti berbagai inisiatif yang telah mereka lakukan dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Harapan besar



diutarakan agar penghargaan ini dapat menjadi motivasi tambahan bagi kedua pejabat untuk melanjutkan inovasi dan program yang bermanfaat bagi Bombana.



*Gambar 3.21*

*Pemberian Penghargaan Sultra Award oleh Pj. Sekda Provinsi Sultra*

### 13. DILAN AWARD

Pemerintah Kabupaten Bombana meraih penghargaan pada DILAN AWARD pada Acara Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024 yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Mall The Park Kendari (4/10/2024). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dalam mendorong akses keuangan melalui pengembangan sektor unggulan daerah serta peningkatan literasi keuangan di masyarakat.

Penghargaan ini menandai komitmen Pemerintahan Kabupaten Bombana dalam potensi sektor unggulan daerah, memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.





Gambar 3.22

Pemberian Penghargaan DILAN AWARD Pemda Bombana oleh OJK



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bombana berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun kedepannya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Bombana dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap Tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah dikategorikan berhasil dicapai karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja sebagai berikut:

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REAL	CAPAIAN
						ISASI	(%)
1	Meningkatnya	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,5	5,04	91,64
	Pertumbuhan Ekonomi	2	Tingkat Kemiskinan	Persen	9,75	10,54	91,90
	yang Berkualitas	3	Angka Pengangguran	Persen	2,64	1,43	145,83
2	Meningkatnya Kualitas	4	Indeks Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar	Poin	71,80	78,17	108,87
	Infrastruktur Daerah	5	Indeks Konektifitas Wilayah	Poin	71,17	51,45	72,29
3	Meningkatnya Kualitas SDM	6	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	68,73	68,85	100,17
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,96	76.11	108,79
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel	8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	89,00	85,33	95,88
		9	Opini Laporan Keuangan	Predikat	WTP	WTP	100,00
		10	Nilai Maturitas SPIP	Poin	3,30	3,6	109,09
		11	Nilai SAKIP	Poin	67,50	67,76	100,39



Dari tabel diatas capaian tahun 2024 sebagai implelementasi tahun pertama RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 secara umum tercapai sesuai target dan perlu peningkatan kinerja pada tahun 2024 dalam mendukung pencapaian tujuan Kabupaten Bombana.

Rumbia, Maret 2025



BUPATI BOMBANA,

Ir. H. BURHANUDDIN, M.Si